



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 seri D);

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
5. Bupati adalah Bupati Banyumas.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Banyumas.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
9. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas yang dipilih oleh masyarakat desa melalui Pemilihan Kepala Desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa di Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Seksi serta Kepala Urusan.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana alokasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
24. Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
25. Kepala Seksi adalah pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
26. Bendahara Desa, selanjutnya disebut Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDDesa melalui rekening kas desa.
29. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDDesa melalui rekening kas desa.
30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.

32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
34. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
35. Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan adalah dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
36. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut dengan BUMDes adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Peraturan Desa sebagai usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (12) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa karena jabatannya adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa pada setiap awal tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- f. mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Seksi dan Bendahara selaku PTPKD.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa pada setiap awal tahun anggaran dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Dalam hal staf pada Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong, Kepala Desa menetapkan Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara.
- (4) Dalam hal Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berhalangan sementara sebelum tahun anggaran berakhir, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Harian Bendahara.

BAB IV APBDesa

Pasal 8

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (5) Seluruh uang yang menjadi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa harus masuk dan keluar melalui rekening kas desa dan dicatat dalam Buku Bank Desa.
- (6) Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya ditetapkan 1 (satu) rekening pada Bank yang berlokasi dekat desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berasal dari hasil tanah eks-bengkok, tanah kas desa yang berasal dari pembelian atau pengadaan tanah kas desa yang dibiayai APBDesa, hasil Perusahaan Milik Desa atau BUMDes, atau hasil Usaha Lembaga Desa lainnya.

- (5) Hasil Usaha Lembaga Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain iuran Dharma Tirta atau Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (6) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berasal dari hasil tanah kas desa yang merupakan asli kekayaan desa (bondowong desa), hasil tambatan perahu, hasil pasar desa, hasil tempat pemandian umum, hasil jaringan irigasi, hasil pasar hewan desa, hasil bangunan desa, hasil obyek wisata milik desa atau hasil penjualan aset desa yang tidak dipisahkan.
- (7) Hasil penjualan aset desa yang tidak dipisahkan dapat berasal dari hasil pelepasan hak atas tanah, penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai, penjualan drum bekas, penjualan hasil pennebangan pohon milik desa, penjualan bahan-bahan bekas bangunan milik desa, penjualan hasil pertanian, penjualan hasil perkebunan, penjualan hasil peternakan, atau penjualan hasil perikanan.
- (8) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat desa berupa uang, tenaga dan/atau barang yang dinilai dengan uang yang bersifat sukarela.
- (9) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa, jasa giro, pendapatan bunga tabungan bank, pendapatan bunga deposito, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian desa, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran, atau pendapatan dari angsuran penjualan barang milik desa.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Kabupaten untuk Desa;
 - c. ADD;
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Tata cara dan pengalokasian Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Kabupaten untuk Desa, ADD dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 11

- (1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dan/atau barang dari pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Yang dimaksud pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (3) adalah masyarakat di luar desa, instansi non pemerintah, lembaga dan/atau organisasi di luar desa, atau perusahaan yang berlokasi di desa dan/atau di luar desa.
- (5) Ketentuan tentang tata cara pemberian dan penerimaan hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 12

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.
- (4) Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa di desa.

Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDDesa Kode Rekening Pendapatan Kelompok Transfer jenis ADD.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDDesa Kode Rekening Pendapatan selain Kelompok Transfer jenis Dana Desa.
- (5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;

- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan 31 Oktober tahun berjalan.
- (5) Peraturan Desa tentang APBDesa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (6) Dalam hal penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa melebihi tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), desa dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
 - a. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa dan BPD tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Keputusan BPD tentang Pemberian Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (4) Evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. format susunan APBDesa;
 - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. kesesuaian dengan RKPDesa tahun berkenaan;
 - d. keserasian antara kebijakan Kabupaten dan kebijakan desa;
 - e. keserasian dengan kepentingan umum
- (5) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan Keputusan Camat dan segera setelah itu disampaikan Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.
- (6) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan cakupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (7) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- (8) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan cakupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (9) Hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (10) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belanja desa selain untuk operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam Perubahan APBDesa.

Pasal 23

- (1) Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (6) atau Pasal 21 ayat (9) disampaikan kepada Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diundangkan.
- (2) Untuk membantu Camat dalam mengevaluasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, pada setiap awal tahun dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Camat selaku penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Camat selaku Ketua Tim;
 - c. Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan Kecamatan sebagai anggota Tim.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dicatat dalam Buku Bank Desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dengan jumlah paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang persediaan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat segera untuk operasional pemerintah desa.
- (3) Operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, d, e, h dan j.
- (4) Bendahara mengajukan surat permintaan uang persediaan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (5) Kepala Desa dan Bendahara bertanggung jawab terhadap keberadaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Kepala Desa dilarang memegang uang kas desa kecuali untuk keperluan pembayaran barang dan/atau jasa.

Pasal 26

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. SPP;
- b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan
- c. lampiran bukti transaksi.

Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati tersendiri.

Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Kepala Desa dapat mulai mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada BPD untuk dibahas bersama, pada bulan Juni tahun berjalan dan paling lambat sudah disepakati bersama Kepala Desa dan BPD pada akhir bulan Agustus tahun berjalan.
- (4) Tata cara penetapan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara.
- (2) Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan SPP serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Nota Kesepakatan dan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

2. desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2015 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun 2015.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 MAR 2015

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 16 MAR 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA
ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDESA SEMESTER, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDESA, NOTA KESEPAKATAN DAN KEPUTUSAN BPD

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa



KEPALA DESA.....KECAMATAN....
KABUPATEN BANYUMAS

RANCANGAN PERATURAN DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KECAMATAN.....KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan DesaKecamatan..... Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)..... Kecamatan..... Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang APBDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
 9. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp.....
===== |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp.....
===== |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA
TTD
(NAMA TANPA TITLE)
.....

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DESA
....KECAMATAN ... KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN.....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING							URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
I							II	III	IV
1							<u>PENDAPATAN DESA</u>		
1	1						<u>Pendapatan Asli Desa</u>		
1	1	1					<u>Hasil Usaha</u>		
1	1	1	1				Hasil Pengelolaan Aset Desa yang Dipisahkan		
1	1	1	1	1		1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Desa /BUM Desa		
1	1	1	1	1		2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD		
1	1	1	1	1		3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah /BUMN		
1	1	1	1	1		4	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat		
1	1	1	2				Hasil eks-Bengkok Desa		
1	1	1	2	1			eks-Bengkok Kepala Desa		
1	1	1	2	2			eks-Bengkok Sekretaris Desa		
1	1	1	2	3			eks-Bengkok Kepala Dusun		
1	1	1	2	3	1		eks-Bengkok Kepala Dusun I		

1	1	1	2	3	2	eks-Bengkok Kepala Dusun II		
1	1	1	2	3	3	eks-Bengkok Kepala Dusun III		
1	1	1	2	3	4	dst...		
1	1	1	2	4		eks-Bengkok Kepala Seksi		
1	1	1	2	4	1	eks-Bengkok Kepala Seksi Pembangunan		
1	1	1	2	4	2	eks-Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan		
1	1	1	2	4	3	eks-Bengkok Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
1	1	1	2	5		eks-Bengkok Kepala Urusan		
1	1	1	2	5	1	eks-Bengkok Kepala Urusan Keuangan		
1	1	1	2	5	2	eks-Bengkok Kepala Urusan Umum		
1	1	1	2	6		eks-Bengkok Staf/Pembantu		
1	1	1	2	6	1	eks-Bengkok Staf/Pembantu Kasi		
1	1	1	2	6	2	eks-Bengkok Staf/Pembantu Kaur		
1	1	1	2	6	3	dst...		
1	1	1	3			Iuran Dharma Tirta/Perkumpulan Petani Pemakai Air		
1	1	1	4			Hasil Tanah Kas Desa yang berasal dari Pembelian/Pengadaan yang dibiayai APBDesa		
1	1	1	5			Lain-lain Hasil Usaha Desa yang Sah		
1	1	2				<u>Hasil Aset Desa</u>		
1	1	2	1			Hasil Tanah Kas Desa Asli Kekayaan Desa		
1	1	2	1	1		Bondo Desa		
1	1	2	1	2		Dst...		
1	1	2	2			Hasil Pasar Desa		
1	1	2	2	1		Hasil Pasar Desa yang dikelola sendiri		
1	1	2	2	2		Dst.....		
1	1	2	3			Hasil Pasar Hewan Desa		
1	1	2	3	1		Hasil Pasar Hewan Desa yang dikelola sendiri		
1	1	2	4			Hasil Bangunan Desa		
1	1	2	4	1		Hasil Sewa Aula Desa/Gedung Pertemuan Desa		
1	1	2	4	2		Dst.....		
1	1	2	5			Objek Rekreasi Desa		
1	1	2	5	1		Retribusi Obyek Rekreasi		
1	1	2	5	2		Retribusi Parkir Obyek Rekreasi		
1	1	2	5	3		Dst.....		
1	1	2	6			Hasil Pemandian Umum Desa		
1	1	2	6	1		Retribusi Pemandian Umum Desa		
1	1	2	6	2		Dst.....		

1	1	2	7		Lain-lain Hasil Kekayaan Milik Desa		
1	1	2	7	1	Hasil Kios Desa		
1	1	2	7	2	Dst.....		
1	1	2	8		Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak Dipisahkan		
1	1	2	8	1	Pelepasan Hak Atas Tanah		
1	1	2	8	2	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak Terpakai		
1	1	2	8	3	Penjualan Drum Bekas		
1	1	2	8	4	Penjualan Hasil Penebangan Pohon		
1	1	2	8	5	Penjualan Bahan-bahan Bebekas Bangunan		
1	1	2	8	6	Penjualan Hasil Pertanian		
1	1	2	8	7	Penjualan Hasil Perkebunan		
1	1	2	8	8	Penjualan Hasil Peternakan		
1	1	2	8	9	Penjualan Hasil Perikanan		
1	1	2	8	10	Dst.....		
1	1	3			<u>Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat</u>		
1	1	3	1		Berupa uang tunai		
1	1	3	2		Berupa barang yang dinilai uang		
1	1	3	3		Berupa tenaga yang dinilai uang		
1	1	4			<u>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah</u>		
					-		
1	1	4	1		Pungutan Desa (harus ada Perdesnya)		
1	1	4	1	1	Pungutan Desa atas....		
1	1	4	1	2	Pungutan Desa atas.... Dst		
1	1	4	2		Jasa Giro		
1	1	4	2	1	Jasa Giro Kas Desa		
1	1	4	2	2	Jasa Giro Pemegang Kas		
1	1	4	2	3	Jasa Giro Dana Cadangan		
1	1	4	2	4	Dst.....		
1	1	4	3		Pendapatan Bunga Deposito		
1	1	4	3	1	Rekening Deposito pada Bank.....		
1	1	4	3	2	Dst.....		
1	1	4	4		Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa		
1	1	4	4	1	Kerugian Uang Desa		
1	1	4	4	2	Kerugian Barang Desa		
1	1	4	4	3	Dst.....		

1	1	4	5		Penerimaan Komisi, Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau Jasa oleh Desa		
1	1	4	5	1	Penerimaan Komisi dari		
1	1	4	5	2	Penerimaan Potongan dari		
1	1	4	5	3	Dst		
1	1	4	6		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
1	1	4	6	1	Kegiatan Pembuatan Jalan		
1	1	4	6	2	Kegiatan Pengaspalan Jalan		
1	1	4	6	3	Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi		
1	1	4	6	4	Kegiatan Rehabilitas Irigasi		
1	1	4	6	5	Kegiatan Pembuatan Jembatan		
1	1	4	6	6	Kegiatan Rehabilitas Jembatan		
1	1	4	6	7	Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa		
1	1	4	6	8	Kegiatan Rehabilitas Bangunan Desa		
1	1	4	6	9	Dst.....		
1	1	4	7		Pendapatan dari Pengembalian		
1	1	4	7	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan		
1	1	4	7	2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
1	1	4	7	3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas		
1	1	4	7	4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan dari Uang Muka		
1	1	4	7	5	Dst.....		
1	1	4	9		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
1	1	4	9	1	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
1	1	4	9	2	Dst.....		
1	2				<u>Pendapatan Transfer</u>		
1	2	1			<u>Dana Desa</u>		
1	2	2			<u>Bagian dari Hasil Pajak dan/atau Retribusi Daerah Kabupaten untuk Desa</u>		
1	2	3			<u>Alokasi Dana Desa (ADD)</u>		
1	2	4			<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi</u>		
1	2	4	1		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Umum		

1	2	4	2			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Khusus		
1	2	5				<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten</u>		
1	2	5	1			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Umum		
1	2	5	2			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Khusus		
1	3					<u>Pendapatan Lain-Lain</u>		
1	3	1				<u>Hibah</u>		
1	3	1	1			Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Dalam Desa		
1	3	1	1	1		Hibah dari Lembaga/Organisasi Negara Non Pemerintah		
1	3	1	1	2		Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta		
1	3	1	2			Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Luar Desa		
1	3	1	2	1		Hibah dari Lembaga/Organisasi Negara Non Pemerintah		
1	3	1	2	2		Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta		
1	3	2				Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam		
1	3	2	1			Dana Darurat Dari Pemerintah		
1	3	2	2			Dana Darurat Dari Pemerintah Provinsi		
1	3	2	3			Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten		
1	3	2	4			Dana Darurat Dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah		
1	3	3				Sumbangan Lainnya Yang Tidak Mengikat		
1	3	3	1			Hadiah		
1	3	3	1	1		Hadiah Lomba Desa		
1	3	3	1	2		Hadiah Lomba PKK		
1	3	3	1	3		Hadiah Lomba PBB		
1	3	3	1	4		Hadiah Lomba.....		
1	3	3	2			Donasi		
1	3	3	3			Lain-lain Sumbangan		
1						JUMLAH PENDAPATAN		
2						<u>BELANJA DESA</u>		
2	1					<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>		

2	1	1				Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1			Belanja Pegawai		
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa		
2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa		
2	1	1	1	1	2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa		
2	1	1	1	1	4	Penghasilan Tetap Kepala Dusun I		
2	1	1	1	1	5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun II		
2	1	1	1	1	6	Penghasilan Tetap Kepala Dusun III		
2	1	1	1	1	7	dst...		
2	1	1	1	1	9	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pembangunan		
2	1	1	1	1	10	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pemerintahan		
2	1	1	1	1	11	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	1	13	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan		
2	1	1	1	1	14	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum		
2	1	1	1	1	16	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Pembangunan		
2	1	1	1	1	17	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan		
2	1	1	1	1	18	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	1	19	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Umum		
2	1	1	1	1	20	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Keuangan		
2	1	1	1	1	21	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun I		
2	1	1	1	1	22	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun II		
2	1	1	1	1	23	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun III		
2	1	1	1	1	24	dst...		
2	1	1	1	2		Tunjangan-Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa		
2	1	1	1	2	1	Tunjangan Jabatan Kepala Desa		
2	1	1	1	2	2	Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa		
2	1	1	1	2	4	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun I		
2	1	1	1	2	5	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun II		
2	1	1	1	2	6	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun III		
2	1	1	1	2	7	dst...		
2	1	1	1	2	9	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Pembangunan		

2	1	1	1	2	10	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	11	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	13	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Keuangan		
2	1	1	1	2	14	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Umum		
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Pembangunan		
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	17	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kaur Keuangan		
2	1	1	1	2	17	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kaur Umum		
2	1	1	1	1	21	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun I		
2	1	1	1	1	22	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun II		
2	1	1	1	1	23	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun III		
2	1	1	1	2	18	dst...		
2	1	1	1	2	19	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Desa		
2	1	1	1	2	20	Tunjangan Istri atau Suami Sekretaris Desa		
2	1	1	1	2	22	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun I		
2	1	1	1	2	23	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun II		
2	1	1	1	2	24	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun III		
2	1	1	1	2	25	dst...		
2	1	1	1	2	27	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Pembangunan		
2	1	1	1	2	28	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	29	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	31	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Urusan Keuangan		
2	1	1	1	2	32	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Urusan Umum		
2	1	1	1	2	35	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Pembangunan		

2	1	1	1	2	36	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	37	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	39	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kaur Umum		
2	1	1	1	2	40	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kaur Keuangan		
2	1	1	1	2	42	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus I		
2	1	1	1	2	43	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus II		
2	1	1	1	2	44	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus III		
2	1	1	1	2	45	dst...		
2	1	1	1	2	46	Tunjangan Anak Kepala Desa		
2	1	1	1	2	47	Tunjangan Anak Pertama Kepala Desa		
2	1	1	1	2	48	Tunjangan Anak Kedua Kepala Desa		
2	1	1	1	2	49	Tunjangan Anak Sekretaris Desa		
2	1	1	1	2	50	Tunjangan Anak Pertama Sekretaris Desa		
2	1	1	1	2	51	Tunjangan Anak Kedua Sekretaris Desa		
2	1	1	1	2	52	Tunjangan Anak Kepala Dusun		
2	1	1	1	2	53	Tunjangan Anak Kepala Dusun I		
2	1	1	1	2	54	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun I		
2	1	1	1	2	55	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun I		
2	1	1	1	2	56	Tunjangan Anak Kepala Dusun II		
2	1	1	1	2	57	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun II		
2	1	1	1	2	58	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun II		
2	1	1	1	2	59	Tunjangan Anak Kepala Dusun III		
2	1	1	1	2	60	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun III		
2	1	1	1	2	61	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun III		
2	1	1	1	2	62	dst...		
2	1	1	1	2	63	Tunjangan Anak Kepala Seksi		
2	1	1	1	2	64	Tunjangan Anak Kepala Seksi Pembangunan		
2	1	1	1	2	65	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Pembangunan		
2	1	1	1	2	66	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Pembangunan		
2	1	1	1	2	67	Tunjangan Anak Kepala Seksi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	68	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	69	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Pemerintahan		

2	1	1	1	2	70	Tunjangan Anak Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	71	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	72	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	73	Tunjangan Anak Kepala Urusan		
2	1	1	1	2	74	Tunjangan Anak Kepala Urusan Keuangan		
2	1	1	1	2	75	Tunjangan Anak Pertama Kepala Urusan Keuangan		
2	1	1	1	2	76	Tunjangan Anak Kedua Kepala Urusan Keuangan		
2	1	1	1	2	77	Tunjangan Anak Kepala Urusan Umum		
2	1	1	1	2	78	Tunjangan Anak Pertama Kepala Urusan Umum		
2	1	1	1	2	79	Tunjangan Anak Kedua Kepala Urusan Umum		
2	1	1	1	2	80	Tunjangan Anak Staf/Pembantu		
2	1	1	1	2	81	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Pembangunan		
2	1	1	1	2	82	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Pembangunan		
2	1	1	1	2	83	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Pembangunan		
2	1	1	1	2	84	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	85	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	86	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	87	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	88	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	89	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	90	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kaur Umum		
2	1	1	1	2	91	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kaur Umum		
2	1	1	1	2	92	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kaur Umum		

2	1	1	1	2	93	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kaur Keuangan		
2	1	1	1	2	94	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kaur Keuangan		
2	1	1	1	2	95	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kaur Keuangan		
2	1	1	1	2	96	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus I		
2	1	1	1	2	97	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus I		
2	1	1	1	2	98	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus I		
2	1	1	1	2	99	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus II		
2	1	1	1	2	100	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus II		
2	1	1	1	2	101	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus II		
2	1	1	1	2	102	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus III		
2	1	1	1	2	103	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus III		
2	1	1	1	2	104	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus III		
2	1	1	1	2	105	dst...		
2	1	1	1	2	106	Tunjangan Kesehatan Kepala Desa		
2	1	1	1	2	107	Tunjangan Kesehatan Sekretaris Desa		
2	1	1	1	2	108	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun		
2	1	1	1	2	109	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun I		
2	1	1	1	2	110	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun II		
2	1	1	1	2	111	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun III		
2	1	1	1	2	112	dst...		
2	1	1	1	2	113	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi		
2	1	1	1	2	114	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Pembangunan		
2	1	1	1	2	115	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	116	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	117	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan		
2	1	1	1	2	118	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan Keuangan		
2	1	1	1	2	119	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan Umum		
2								
2	1	1	1	3		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa		
2	1	1	1	3	1	Tambahan Penghasilan Kepala Desa		

2	1	1	1	3	2	Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa		
2	1	1	1	3	3	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun		
2	1	1	1	3	4	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun I		
2	1	1	1	3	5	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun II		
2	1	1	1	3	6	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun III		
2	1	1	1	3	7	dst...		
2	1	1	1	3	8	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi		
2	1	1	1	3	9	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pembangunan		
2	1	1	1	3	10	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pemerintahan		
2	1	1	1	3	11	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	3	12	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan		
2	1	1	1	3	13	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Keuangan		
2	1	1	1	3	14	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Umum		
2	1	1	1	3	15	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu		
2	1	1	1	3	16	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Pembangunan		
2	1	1	1	3	17	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan		
2	1	1	1	3	18	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	3	19	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kaur Umum		
2	1	1	1	3	20	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kaur Keuangan		
2	1	1	1	3	21	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun I		
2	1	1	1	3	22	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun II		
2	1	1	1	3	23	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun III		
2	1	1	1	3	24	dst...		
2	1	1	1	4		Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		
2	1	1	1	4	1	Tunjangan Ketua BPD		
2	1	1	1	4	2	Tunjangan Wakil Ketua BPD		
2	1	1	1	4	3	Tunjangan Bidang I BPD		
2	1	1	1	4	4	Tunjangan Bidang ... BPD		
2	1	1	1	4	5	Tunjangan Bidang ... BPD		
2	1	1	1	4	6	Tunjangan Bidang ... BPD		
2	1	1	1	4	7	Tunjangan Anggota BPD		
2	1	1	1	4	8	Tunjangan Anggota BPD		

2	1	1	1	4	9	Tunjangan Anggota BPD		
2	1	1	1	4	10	Tunjangan Anggota BPD		
2	1	1	1	4	11	Tunjangan Anggota BPD		
						-		
2	1	2				Operasional Pemerintahan Desa		
2	1	2	1			Operasional Perkantoran		
2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	1	2	2	1		- Alat Tulis Kantor		
2	1	2	2	2		- Benda POS		
2	1	2	2	3		- Pakaian Dinas dfan Atribut		
2	1	2	2	4		- Pakaian Dinas		
2	1	2	2	5		- Alat dan Bahan Kebersihan		
2	1	2	2	6		- Perjalanan Dinas		
2	1	2	2	7		- Pemeliharaan		
2	1	2	2	8		- Air, Listrik,dasn Telepon		
2	1	2	2	9		- Honor		
2	1	2	2	10		- dst.....		
2	1	2	3			Belanja Modal		
2	1	2	3	1		- Komputer		
2	1	2	3	2		- Meja dan Kursi		
2	1	2	3	3		- Mesin TIK		
2	1	2	3	4		- Pengadaan Tanah Kas Desa		
2	1	2	3	5		- dst.....		
2	1	2	4			Operasional BPD		
2	1	2	4	1		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	2	4	1	1	- ATK		
2	1	2	4	1	2	- Penggandaan		
2	1	2	4	1	3	- Konsumsi Rapat		
2	1	2	4	1	4	- dst		
2	1	2	5			Operasional RT/ RW		
2	1	2	5	1		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	2	5	1	1	- ATK		
2	1	2	5	1	2	- Penggandaan		
2	1	2	5	1	3	- Konsumsi Rapat		
2	1	2	5	1	4	- dst		
2	2					<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>		
2	2	1				Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	1			Belanja Barang dan jasa		
2	2	1	1	1		- Upah Kerja		
2	2	1	1	2		- Honor		
2	2	1	1	3		- dst.....		
2	2	1	2			Belanja Modal		
2	2	1	2	1		- Semen		
2	2	1	2	2		- Material		
2	2	1	2	3		- dst.....		
2	2					Pengaspalan jalan desa		

2	2	2	1			Belanja Barang dan Jasa :		
2	2	2	1	1		- Upah Kerja		
2	2	2	1	2		- Honor		
2	2	2	1	3		- dst.....		
2	2	2	2			Belanja Modal:		
2	2	2	2	1		- Aspal		
2	2	2	2	2		- Pasir		
2	2	2	2	3		- dst		
2	2	3				Kegiatan.....dst		
2	3					<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>		
2	3	1				Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	1			Belanja Barang dan Jasa:		
2	3	1	1	1		- Honor Pelatih		
2	3	1	1	2		- Konsumsi		
2	3	1	1	3		- Bahan Pelatihan		
2	3	1	1	4		- dst.....		
2	3	2				Kegiatan.....dst		
2	4					<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>		
2	4	1				Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	1			Belanja Barang dan Jasa:		
2	4	1	1	1		- Honor pelatih		
2	4	1	1	2		- Konsumsi		
2	4	1	1	3		- Bahan pelatihan		
2	4	1	1	4		- dst.....		
2	4	2				Kegiatan.....dst		
2	5					<u>Bidang Tak Terduga</u>		
2	5	1				Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	1			Belanja Barang dan Jasa:		
2	5	1	1	1		- Honor tim		
2	5	1	1	2		- Konsumsi		
2	5	1	1	3		- Obat-obatan		
2	5	1	1	4		- dst.....		
2	5	2				Kegiatan.....dst		
2						<u>JUMLAH BELANJA</u>		
						<u>SURPLUS / DEFISIT</u>		
3						<u>PEMBIAYAAN</u>		

3	1					<u>Penerimaan Pembiayaan</u>		
3	1	1				SiLPA		
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan		
3	1	2	1			Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa		
3	1	2	2			Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa		
3	1	2	2	1		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa		
3	1	2	2	2		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa		
3	1	2	2	3		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Seksi...		
3	1	2	2	4		dst....		
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
3	1					JUMLAH (RP)		
3								
3	2					<u>Pengeluaran Pembiayaan</u>		
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	1	1			Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa		
3	2	1	2			Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa		
3	2	1	2	1		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa		
3	2	1	2	2		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa		
3	2	1	2	3		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Seksi...		
3	2	1	2	4		dst....		
3	2	2				Penyertaan Modal Desa		
3	2					JUMLAH (RP)		

KEPALA DESA.....KECAMATAN....
KABUPATEN BANYUMAS

TTD

(NAMA TANPA TITLE)

B. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATANKABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA..... KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :

2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa.....

.....,Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

.....

.....

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,tanggal
Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

F. Format Penatausahaan

1. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN ANGGARAN

[illegible]

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

3. Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN

BULAN :
BANK CABANG :
REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

....., tanggal
BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	KET
I						II	III	IV	V	VI
1						<u>PENDAPATAN DESA</u>				
1	1					<u>Pendapatan Asli Desa</u>				
1	1	1				<u>Hasil Usaha</u>				
1	1	1	1			Hasil Pengelolaan Aset Desa yang Dipisahkan				
1	1	1	1	1	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Desa /BUM Desa				
1	1	1	1	1	2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD				
1	1	1	1	1	3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah /BUMN				
1	1	1	1	1	4	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat				
1	1	1	2			Hasil eks-Bengkok Desa				
1	1	1	2	1		eks-Bengkok Kepala Desa				
1	1	1	2	2		eks-Bengkok Sekretaris Desa				
1	1	1	2	3		eks-Bengkok Kepala Dusun				
1	1	1	2	3	1	eks-Bengkok Kepala Dusun I				
1	1	1	2	3	2	eks-Bengkok Kepala Dusun II				
1	1	1	2	3	3	eks-Bengkok Kepala Dusun III				
1	1	1	2	3	4	dst...				
1	1	1	2	4		eks-Bengkok Kepala Seksi				
1	1	1	2	4	1	eks-Bengkok Kepala Seksi Pembangunan				
1	1	1	2	4	2	eks-Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan				
1	1	1	2	4	3	eks-Bengkok Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
1	1	1	2	5		eks-Bengkok Kepala Urusan				

1	1	1	2	5	1	eks-Bengkok Kepala Urusan Keuangan				
1	1	1	2	5	2	eks-Bengkok Kepala Urusan Umum				
1	1	1	2	6		eks-Bengkok Staf/Pembantu				
1	1	1	2	6	1	eks-Bengkok Staf/Pembantu Kasi				
1	1	1	2	6	2	eks-Bengkok Staf/Pembantu Kaur				
1	1	1	2	6	3	dst...				
1	1	1	3			Iuran Dharma Tirta/Perkumpulan Petani Pemakai Air				
1	1	1	4			Hasil Tanah Kas Desa yang berasal dari Pembelian/Pengadaan yang dibiayai APBDesa				
1	1	1	5			Lain-lain Hasil Usaha Desa yang Sah				
1	1	2				Hasil Aset Desa				
1	1	2	1			Hasil Tanah Kas Desa Asli Kekayaan Desa				
1	1	2	1	1		Bondo Desa				
1	1	2	1	2		Dst...				
1	1	2	2			Hasil Pasar Desa				
1	1	2	2	1		Hasil Pasar Desa yang dikelola sendiri				
1	1	2	2	2		Dst.....				
1	1	2	3			Hasil Pasar Hewan Desa				
1	1	2	3	1		Hasil Pasar Hewan Desa yang dikelola sendiri				
1	1	2	4			Hasil Bangunan Desa				
1	1	2	4	1		Hasil Sewa Aula Desa/Gedung Pertemuan Desa				
1	1	2	4	2		Dst.....				
1	1	2	5			Objek Rekreasi Desa				
1	1	2	5	1		Retribusi Obyek Rekreasi				
1	1	2	5	2		Retribusi Parkir Obyek Rekreasi				
1	1	2	5	3		Dst.....				
1	1	2	6			Hasil Pemandian Umum Desa				
1	1	2	6	1		Retribusi Pemandian Umum Desa				
1	1	2	6	2		Dst.....				
1	1	2	7			Lain-lain Hasil Kekayaan Milik Desa				
1	1	2	7	1		Hasil Kios Desa				
1	1	2	7	2		Dst.....				
1	1	2	8			Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak Dipisahkan				
1	1	2	8	1		Pelepasan Hak Atas Tanah				

[illegible]

1	1	4	6			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan					
1	1	4	6	1		Kegiatan Pembuatan Jalan					
1	1	4	6	2		Kegiatan Pengaspalan Jalan					
1	1	4	6	3		Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi					
1	1	4	6	4		Kegiatan Rehabilitas Irigasi					
1	1	4	6	5		Kegiatan Pembuatan Jembatan					
1	1	4	6	6		Kegiatan Rehabilitas Jembatan					
1	1	4	6	7		Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa					
1	1	4	6	8		Kegiatan Rehabilitas Bangunan Desa					
1	1	4	6	9		Dst.....					
1	1	4	7			Pendapatan dari Pengembalian					
1	1	4	7	1		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan					
1	1	4	7	2		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
1	1	4	7	3		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas					
1	1	4	7	4		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan dari Uang Muka					
1	1	4	7	5		Dst.....					
1	1	4	9			Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan					
1	1	4	9	1		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan					
1	1	4	9	2		Dst.....					
1	2					<u>Pendapatan Transfer</u>					
1	2	1				<u>Dana Desa</u>					
1	2	2				<u>Bagian dari Hasil Pajak dan/atau Retribusi Daerah Kabupaten untuk Desa</u>					
1	2	3				<u>Alokasi Dana Desa (ADD)</u>					
1	2	4				<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi</u>					
1	2	4	1			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Umum					
1	2	4	2			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Khusus					
1	2	5				<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten</u>					
1	2	5	1			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Umum					

1	2	5	2			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Khusus					
1	3					<u>Pendapatan Lain-Lain</u>					
1	3	1				<u>Hibah</u>					
1	3	1	1			Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Dalam Desa					
1	3	1	1	1		Hibah dari Lembaga/Organisasi Negara Non Pemerintah					
1	3	1	1	2		Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta					
1	3	1	2			Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Luar Desa					
1	3	1	2	1		Hibah dari Lembaga/Organisasi Negara Non Pemerintah					
1	3	1	2	2		Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta					
1	3	2				Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam					
1	3	2	1			Dana Darurat Dari Pemerintah					
1	3	2	2			Dana Darurat Dari Pemerintah Provinsi					
1	3	2	3			Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten					
1	3	2	4			Dana Darurat Dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah					
1	3	3				Sumbangan Lainnya Yang Tidak Mengikat					
1	3	3	1			Hadiah					
1	3	3	1	1		Hadiah Lomba Desa					
1	3	3	1	2		Hadiah Lomba PKK					
1	3	3	1	3		Hadiah Lomba PBB					
1	3	3	1	4		Hadiah Lomba.....					
1	3	3	2			Donasi					
1	3	3	3			Lain-lain Sumbangan					
1						JUMLAH PENDAPATAN					
2						<u>BELANJA DESA</u>					
2	1					<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>					
2	1	1				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
2	1	1	1			Belanja Pegawai					
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa					
2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa					
2	1	1	1	1	2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa					

2	1	1	1	1	4	Penghasilan Tetap Kepala Dusun I				
2	1	1	1	1	5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun II				
2	1	1	1	1	6	Penghasilan Tetap Kepala Dusun III				
2	1	1	1	1	7	dst...				
2	1	1	1	1	9	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	1	10	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	1	11	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	1	13	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	1	14	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	1	16	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	1	17	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	1	18	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	1	19	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	1	20	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	1	21	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun I				
2	1	1	1	1	22	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun II				
2	1	1	1	1	23	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun III				
2	1	1	1	1	24	dst...				
2	1	1	1	2		Tunjangan-Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa				
2	1	1	1	2	1	Tunjangan Jabatan Kepala Desa				
2	1	1	1	2	2	Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	4	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	5	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	6	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	7	dst...				
2	1	1	1	2	9	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	10	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	11	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				

2	1	1	1	2	13	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	14	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	17	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	17	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	1	21	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun I				
2	1	1	1	1	22	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun II				
2	1	1	1	1	23	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	18	dst...				
2	1	1	1	2	19	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Desa				
2	1	1	1	2	20	Tunjangan Istri atau Suami Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	22	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	23	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	24	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	25	dst...				
2	1	1	1	2	27	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	28	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	29	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	31	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	32	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	35	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	36	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	37	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	39	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kaur Umum				

2	1	1	1	2	40	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	42	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus I				
2	1	1	1	2	43	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	44	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	45	dst...				
2	1	1	1	2	46	Tunjangan Anak Kepala Desa				
2	1	1	1	2	47	Tunjangan Anak Pertama Kepala Desa				
2	1	1	1	2	48	Tunjangan Anak Kedua Kepala Desa				
2	1	1	1	2	49	Tunjangan Anak Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	50	Tunjangan Anak Pertama Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	51	Tunjangan Anak Kedua Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	52	Tunjangan Anak Kepala Dusun				
2	1	1	1	2	53	Tunjangan Anak Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	54	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	55	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	56	Tunjangan Anak Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	57	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	58	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	59	Tunjangan Anak Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	60	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	61	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	62	dst...				
2	1	1	1	2	63	Tunjangan Anak Kepala Seksi				
2	1	1	1	2	64	Tunjangan Anak Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	65	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	66	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	67	Tunjangan Anak Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	68	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	69	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	70	Tunjangan Anak Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	71	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	72	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				

2	1	1	1	2	73	Tunjangan Anak Kepala Urusan					
2	1	1	1	2	74	Tunjangan Anak Kepala Urusan Keuangan					
2	1	1	1	2	75	Tunjangan Anak Pertama Kepala Urusan Keuangan					
2	1	1	1	2	76	Tunjangan Anak Kedua Kepala Urusan Keuangan					
2	1	1	1	2	77	Tunjangan Anak Kepala Urusan Umum					
2	1	1	1	2	78	Tunjangan Anak Pertama Kepala Urusan Umum					
2	1	1	1	2	79	Tunjangan Anak Kedua Kepala Urusan Umum					
2	1	1	1	2	80	Tunjangan Anak Staf/Pembantu					
2	1	1	1	2	81	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Pembangunan					
2	1	1	1	2	82	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Pembangunan					
2	1	1	1	2	83	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Pembangunan					
2	1	1	1	2	84	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan					
2	1	1	1	2	85	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan					
2	1	1	1	2	86	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan					
2	1	1	1	2	87	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	1	1	1	2	88	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	1	1	1	2	89	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	1	1	1	2	90	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kaur Umum					
2	1	1	1	2	91	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kaur Umum					
2	1	1	1	2	92	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kaur Umum					
2	1	1	1	2	93	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kaur Keuangan					
2	1	1	1	2	94	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kaur Keuangan					
2	1	1	1	2	95	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kaur Keuangan					
2	1	1	1	2	96	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus I					
2	1	1	1	2	97	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus I					

2	1	1	1	2	98	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus I				
2	1	1	1	2	99	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	100	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	101	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	102	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	103	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	104	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	105	dst...				
2	1	1	1	2	106	Tunjangan Kesehatan Kepala Desa				
2	1	1	1	2	107	Tunjangan Kesehatan Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	108	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun				
2	1	1	1	2	109	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	110	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	111	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	112	dst...				
2	1	1	1	2	113	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi				
2	1	1	1	2	114	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	115	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	116	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	117	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan				
2	1	1	1	2	118	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	119	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan Umum				
2										
2	1	1	1	3		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa				
2	1	1	1	3	1	Tambahan Penghasilan Kepala Desa				
2	1	1	1	3	2	Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa				
2	1	1	1	3	3	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun				
2	1	1	1	3	4	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun I				
2	1	1	1	3	5	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun II				
2	1	1	1	3	6	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun III				
2	1	1	1	3	7	dst...				
2	1	1	1	3	8	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi				
2	1	1	1	3	9	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pembangunan				

2	1	1	1	3	10	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	3	11	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	3	12	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan				
2	1	1	1	3	13	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	3	14	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	3	15	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu				
2	1	1	1	3	16	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	3	17	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	3	18	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	3	19	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	3	20	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	3	21	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun I				
2	1	1	1	3	22	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun II				
2	1	1	1	3	23	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun III				
2	1	1	1	3	24	dst...				
2	1	1	1	4		Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
2	1	1	1	4	1	Tunjangan Ketua BPD				
2	1	1	1	4	2	Tunjangan Wakil Ketua BPD				
2	1	1	1	4	3	Tunjangan Bidang I BPD				
2	1	1	1	4	4	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	5	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	6	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	7	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	8	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	9	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	10	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	11	Tunjangan Anggota BPD				
						-				
2	1	2				Operasional Pemerintahan Desa				
2	1	2	1			Operasional Perkantoran				
2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	2	1		- Alat Tulis Kantor				

2	1	2	2	2		- Benda POS				
2	1	2	2	3		- Pakaian Dinas dfan Atribut				
2	1	2	2	4		- Pakaian Dinas				
2	1	2	2	5		- Alat dan Bahan Kebersihan				
2	1	2	2	6		- Perjalanan Dinas				
2	1	2	2	7		- Pemeliharaan				
2	1	2	2	8		- Air, Listrik,dasn Telepon				
2	1	2	2	9		- Honor				
2	1	2	2	10		- dst.....				
2	1	2	3			Belanja Modal				
2	1	2	3	1		- Komputer				
2	1	2	3	2		- Meja dan Kursi				
2	1	2	3	3		- Mesin TIK				
2	1	2	3	4		- Pengadaan Tanah Kas Desa				
2	1	2	3	5		- dst.....				
2	1	2	4			Operasional BPD				
2	1	2	4	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	4	1	1	- ATK				
2	1	2	4	1	2	- Penggandaan				
2	1	2	4	1	3	- Konsumsi Rapat				
2	1	2	4	1	4	- dst				
2	1	2	5			Operasional RT/ RW				
2	1	2	5	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	5	1	1	- ATK				
2	1	2	5	1	2	- Penggandaan				
2	1	2	5	1	3	- Konsumsi Rapat				
2	1	2	5	1	4	- dst				
2	2					<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>				
2	2	1				Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	1			Belanja Barang dan jasa				
2	2	1	1	1		- Upah Kerja				
2	2	1	1	2		- Honor				
2	2	1	1	3		- dst.....				
2	2	1	2			Belanja Modal				
2	2	1	2	1		- Semen				
2	2	1	2	2		- Material				
2	2	1	2	3		- dst.....				
2	2					Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	1			Belanja Barang dan Jasa :				
2	2	2	1	1		- Upah Kerja				
2	2	2	1	2		- Honor				
2	2	2	1	3		- dst.....				
2	2	2	2			Belanja Modal:				
2	2	2	2	1		- Aspal				
2	2	2	2	2		- Pasir				

2	2	2	2	3		- dst					
2	2	3				Kegiatan.....dst					
2	3					<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>					
2	3	1				Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					
2	3	1	1			Belanja Barang dan Jasa:					
2	3	1	1	1		- Honor Pelatih					
2	3	1	1	2		- Konsumsi					
2	3	1	1	3		- Bahan Pelatihan					
2	3	1	1	4		- dst.....					
2	3	2				Kegiatan.....dst					
2	4					<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>					
2	4	1				Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	1	1			Belanja Barang dan Jasa:					
2	4	1	1	1		- Honor pelatih					
2	4	1	1	2		- Konsumsi					
2	4	1	1	3		- Bahan pelatihan					
2	4	1	1	4		- dst.....					
2	4	2				Kegiatan.....dst					
2	5					<u>Bidang Tak Terduga</u>					
2	5	1				Kegiatan Kejadian Luar Biasa					
2	5	1	1			Belanja Barang dan Jasa:					
2	5	1	1	1		- Honor tim					
2	5	1	1	2		- Konsumsi					
2	5	1	1	3		- Obat-obatan					
2	5	1	1	4		- dst.....					
2	5	2				Kegiatan.....dst					
2						<u>JUMLAH BELANJA</u>					
						<u>SURPLUS / DEFISIT</u>					
3						<u>PEMBIAYAAN</u>					
3	1					<u>Penerimaan Pembiayaan</u>					
3	1	1				SILPA					
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan					
3	1	2	1			Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa					
3	1	2	2			Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa					

3	1	2	2	1		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa				
3	1	2	2	2		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa				
3	1	2	2	3		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Seksi...				
3	1	2	2	4		dst....				
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
3	1					JUMLAH (RP)				
3										
3	2					<u>Pengeluaran Pembiayaan</u>				
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	1	1			Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa				
3	2	1	2			Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa				
3	2	1	2	1		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa				
3	2	1	2	2		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa				
3	2	1	2	3		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Seksi...				
3	2	1	2	4		dst....				
3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
3	2					JUMLAH (RP)				

KEPALA DESA

TTD

(.....)

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA...KECAMATAN.....KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	KET
I						II	III	IV	V	VI
						<u>PINDAHAN SALDO (DARI SEMESTER PERTAMA)</u>				
1						<u>PENDAPATAN DESA</u>				
1	1					<u>Pendapatan Asli Desa</u>				
1	1	1				<u>Hasil Usaha</u>				
1	1	1	1			Hasil Pengelolaan Aset Desa yang Dipisahkan				
1	1	1	1	1	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Desa /BUM Desa				
1	1	1	1	1	2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD				
1	1	1	1	1	3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah /BUMN				
1	1	1	1	1	4	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat				
1	1	1	2			Hasil eks-Bengkok Desa				
1	1	1	2	1		eks-Bengkok Kepala Desa				
1	1	1	2	2		eks-Bengkok Sekretaris Desa				
1	1	1	2	3		eks-Bengkok Kepala Dusun				
1	1	1	2	3	1	eks-Bengkok Kepala Dusun I				
1	1	1	2	3	2	eks-Bengkok Kepala Dusun II				
1	1	1	2	3	3	eks-Bengkok Kepala Dusun III				
1	1	1	2	3	4	dst...				
1	1	1	2	4		eks-Bengkok Kepala Seksi				
1	1	1	2	4	1	eks-Bengkok Kepala Seksi Pembangunan				
1	1	1	2	4	2	eks-Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan				
1	1	1	2	4	3	eks-Bengkok Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
1	1	1	2	5		eks-Bengkok Kepala Urusan				
1	1	1	2	5	1	eks-Bengkok Kepala Urusan Keuangan				

1	1	1	2	5	2	eks-Bengkok Kepala Urusan Umum				
1	1	1	2	6		eks-Bengkok Staf/Pembantu				
1	1	1	2	6	1	eks-Bengkok Staf/Pembantu Kasi				
1	1	1	2	6	2	eks-Bengkok Staf/Pembantu Kaur				
1	1	1	2	6	3	dst...				
1	1	1	3			Iuran Dharma Tirta/Perkumpulan Petani Pemakai Air				
1	1	1	4			Hasil Tanah Kas Desa yang berasal dari Pembelian/Pengadaan yang dibiayai APBDesa				
1	1	1	5			Lain-lain Hasil Usaha Desa yang Sah				
1	1	2				<u>Hasil Aset Desa</u>				
1	1	2	1			Hasil Tanah Kas Desa Asli Kekayaan Desa				
1	1	2	1	1		Bondo Desa				
1	1	2	1	2		Dst...				
1	1	2	2			Hasil Pasar Desa				
1	1	2	2	1		Hasil Pasar Desa yang dikelola sendiri				
1	1	2	2	2		Dst.....				
1	1	2	3			Hasil Pasar Hewan Desa				
1	1	2	3	1		Hasil Pasar Hewan Desa yang dikelola sendiri				
1	1	2	4			Hasil Bangunan Desa				
1	1	2	4	1		Hasil Sewa Aula Desa/Gedung Pertemuan Desa				
1	1	2	4	2		Dst.....				
1	1	2	5			Objek Rekreasi Desa				
1	1	2	5	1		Retribusi Obyek Rekreasi				
1	1	2	5	2		Retribusi Parkir Obyek Rekreasi				
1	1	2	5	3		Dst.....				
1	1	2	6			Hasil Pemandian Umum Desa				
1	1	2	6	1		Retribusi Pemandian Umum Desa				
1	1	2	6	2		Dst.....				
1	1	2	7			Lain-lain Hasil Kekayaan Milik Desa				
1	1	2	7	1		Hasil Kios Desa				
1	1	2	7	2		Dst.....				
1	1	2	8			Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak Dipisahkan				
1	1	2	8	1		Pelepasan Hak Atas Tanah				

1	1	2	8	2	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak Terpakai				
1	1	2	8	3	Penjualan Drum Bekas				
1	1	2	8	4	Penjualan Hasil Penebangan Pohon				
1	1	2	8	5	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan				
1	1	2	8	6	Penjualan Hasil Pertanian				
1	1	2	8	7	Penjualan Hasil Perkebunan				
1	1	2	8	8	Penjualan Hasil Peternakan				
1	1	2	8	9	Penjualan Hasil Perikanan				
1	1	2	8	10	Dst.....				
1	1	3			<u>Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat</u>				
1	1	3	1		Berupa uang tunai				
1	1	3	2		Berupa barang yang dinilai uang				
1	1	3	3		Berupa tenaga yang dinilai uang				
1	1	4			<u>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah</u>				
					-				
1	1	4	1		Pungutan Desa (harus ada Perdesnya)				
1	1	4	1	1	Pungutan Desa atas....				
1	1	4	1	2	Pungutan Desa atas.... Dst				
1	1	4	2		Jasa Giro				
1	1	4	2	1	Jasa Giro Kas Desa				
1	1	4	2	2	Jasa Giro Pemegang Kas				
1	1	4	2	3	Jasa Giro Dana Cadangan				
1	1	4	2	4	Dst.....				
1	1	4	3		Pendapatan Bunga Deposito				
1	1	4	3	1	Rekening Deposito pada Bank.....				
1	1	4	3	2	Dst.....				
1	1	4	4		Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa				
1	1	4	4	1	Kerugian Uang Desa				
1	1	4	4	2	Kerugian Barang Desa				
1	1	4	4	3	Dst.....				
1	1	4	5		Penerimaan Komisi, Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau Jasa oleh Desa				
1	1	4	5	1	Penerimaan Komisi dari				
1	1	4	5	2	Penerimaan Potongan dari				
1	1	4	5	3	Dst				

1	2	5	2			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Khusus					
1	3					<u>Pendapatan Lain-Lain</u>					
1	3	1				<u>Hibah</u>					
1	3	1	1			Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Dalam Desa					
1	3	1	1	1		Hibah dari Lembaga/Organisasi Negara Non Pemerintah					
1	3	1	1	2		Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta					
1	3	1	2			Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Luar Desa					
1	3	1	2	1		Hibah dari Lembaga/Organisasi Negara Non Pemerintah					
1	3	1	2	2		Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta					
1	3	2				Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam					
1	3	2	1			Dana Darurat Dari Pemerintah					
1	3	2	2			Dana Darurat Dari Pemerintah Provinsi					
1	3	2	3			Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten					
1	3	2	4			Dana Darurat Dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah					
1	3	3				Sumbangan Lainnya Yang Tidak Mengikat					
1	3	3	1			Hadiah					
1	3	3	1	1		Hadiah Lomba Desa					
1	3	3	1	2		Hadiah Lomba PKK					
1	3	3	1	3		Hadiah Lomba PBB					
1	3	3	1	4		Hadiah Lomba.....					
1	3	3	2			Donasi					
1	3	3	3			Lain-lain Sumbangan					
1						JUMLAH PENDAPATAN					
2						<u>BELANJA DESA</u>					
2	1					<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>					
2	1	1				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
2	1	1	1			Belanja Pegawai					
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa					
2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa					
2	1	1	1	1	2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa					

2	1	1	1	1	4	Penghasilan Tetap Kepala Dusun I				
2	1	1	1	1	5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun II				
2	1	1	1	1	6	Penghasilan Tetap Kepala Dusun III				
2	1	1	1	1	7	dst...				
2	1	1	1	1	9	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	1	10	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	1	11	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	1	13	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	1	14	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	1	16	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	1	17	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	1	18	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	1	19	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	1	20	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	1	21	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun I				
2	1	1	1	1	22	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun II				
2	1	1	1	1	23	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun III				
2	1	1	1	1	24	dst...				
2	1	1	1	2		Tunjangan-Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa				
2	1	1	1	2	1	Tunjangan Jabatan Kepala Desa				
2	1	1	1	2	2	Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	4	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	5	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	6	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	7	dst...				
2	1	1	1	2	9	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	10	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	11	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				

2	1	1	1	2	13	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	14	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	17	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	17	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	1	21	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun I				
2	1	1	1	1	22	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun II				
2	1	1	1	1	23	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	18	dst...				
2	1	1	1	2	19	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Desa				
2	1	1	1	2	20	Tunjangan Istri atau Suami Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	22	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	23	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	24	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	25	dst...				
2	1	1	1	2	27	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	28	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	29	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	31	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	32	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	35	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	36	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	37	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	39	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kaur Umum				

2	1	1	1	2	40	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	42	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus I				
2	1	1	1	2	43	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	44	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	45	dst...				
2	1	1	1	2	46	Tunjangan Anak Kepala Desa				
2	1	1	1	2	47	Tunjangan Anak Pertama Kepala Desa				
2	1	1	1	2	48	Tunjangan Anak Kedua Kepala Desa				
2	1	1	1	2	49	Tunjangan Anak Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	50	Tunjangan Anak Pertama Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	51	Tunjangan Anak Kedua Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	52	Tunjangan Anak Kepala Dusun				
2	1	1	1	2	53	Tunjangan Anak Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	54	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	55	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	56	Tunjangan Anak Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	57	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	58	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	59	Tunjangan Anak Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	60	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	61	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	62	dst...				
2	1	1	1	2	63	Tunjangan Anak Kepala Seksi				
2	1	1	1	2	64	Tunjangan Anak Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	65	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	66	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	67	Tunjangan Anak Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	68	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	69	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	70	Tunjangan Anak Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	71	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	72	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				

2	1	1	1	2	73	Tunjangan Anak Kepala Urusan					
2	1	1	1	2	74	Tunjangan Anak Kepala Urusan Keuangan					
2	1	1	1	2	75	Tunjangan Anak Pertama Kepala Urusan Keuangan					
2	1	1	1	2	76	Tunjangan Anak Kedua Kepala Urusan Keuangan					
2	1	1	1	2	77	Tunjangan Anak Kepala Urusan Umum					
2	1	1	1	2	78	Tunjangan Anak Pertama Kepala Urusan Umum					
2	1	1	1	2	79	Tunjangan Anak Kedua Kepala Urusan Umum					
2	1	1	1	2	80	Tunjangan Anak Staf/Pembantu					
2	1	1	1	2	81	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Pembangunan					
2	1	1	1	2	82	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Pembangunan					
2	1	1	1	2	83	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Pembangunan					
2	1	1	1	2	84	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan					
2	1	1	1	2	85	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan					
2	1	1	1	2	86	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan					
2	1	1	1	2	87	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	1	1	1	2	88	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	1	1	1	2	89	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	1	1	1	2	90	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kaur Umum					
2	1	1	1	2	91	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kaur Umum					
2	1	1	1	2	92	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kaur Umum					
2	1	1	1	2	93	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kaur Keuangan					
2	1	1	1	2	94	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kaur Keuangan					
2	1	1	1	2	95	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kaur Keuangan					
2	1	1	1	2	96	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus I					
2	1	1	1	2	97	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus I					

2	1	1	1	2	98	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus I				
2	1	1	1	2	99	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	100	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	101	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	102	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	103	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	104	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	105	dst...				
2	1	1	1	2	106	Tunjangan Kesehatan Kepala Desa				
2	1	1	1	2	107	Tunjangan Kesehatan Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	108	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun				
2	1	1	1	2	109	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	110	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	111	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	112	dst...				
2	1	1	1	2	113	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi				
2	1	1	1	2	114	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	115	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	116	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	117	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan				
2	1	1	1	2	118	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	119	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan Umum				
2										
2	1	1	1	3		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa				
2	1	1	1	3	1	Tambahan Penghasilan Kepala Desa				
2	1	1	1	3	2	Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa				
2	1	1	1	3	3	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun				
2	1	1	1	3	4	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun I				
2	1	1	1	3	5	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun II				
2	1	1	1	3	6	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun III				
2	1	1	1	3	7	dst...				
2	1	1	1	3	8	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi				
2	1	1	1	3	9	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pembangunan				

2	1	1	1	3	10	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	3	11	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	3	12	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan				
2	1	1	1	3	13	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	3	14	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	3	15	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu				
2	1	1	1	3	16	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	3	17	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	3	18	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	3	19	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	3	20	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	3	21	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun I				
2	1	1	1	3	22	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun II				
2	1	1	1	3	23	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun III				
2	1	1	1	3	24	dst...				
2	1	1	1	4		Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
2	1	1	1	4	1	Tunjangan Ketua BPD				
2	1	1	1	4	2	Tunjangan Wakil Ketua BPD				
2	1	1	1	4	3	Tunjangan Bidang I BPD				
2	1	1	1	4	4	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	5	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	6	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	7	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	8	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	9	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	10	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	11	Tunjangan Anggota BPD				
						-				
2	1	2				Operasional Pemerintahan Desa				
2	1	2	1			Operasional Perkantoran				
2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	2	1		- Alat Tulis Kantor				

2	1	2	2	2		- Benda POS				
2	1	2	2	3		- Pakaian Dinas dfan Atribut				
2	1	2	2	4		- Pakaian Dinas				
2	1	2	2	5		- Alat dan Bahan Kebersihan				
2	1	2	2	6		- Perjalanan Dinas				
2	1	2	2	7		- Pemeliharaan				
2	1	2	2	8		- Air, Listrik,dasn Telepon				
2	1	2	2	9		- Honor				
2	1	2	2	10		- dst.....				
2	1	2	3			Belanja Modal				
2	1	2	3	1		- Komputer				
2	1	2	3	2		- Meja dan Kursi				
2	1	2	3	3		- Mesin TIK				
2	1	2	3	4		- Pengadaan Tanah Kas Desa				
2	1	2	3	5		- dst.....				
2	1	2	4			Operasional BPD				
2	1	2	4	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	4	1	1	- ATK				
2	1	2	4	1	2	- Penggandaan				
2	1	2	4	1	3	- Konsumsi Rapat				
2	1	2	4	1	4	- dst				
2	1	2	5			Operasional RT/ RW				
2	1	2	5	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	5	1	1	- ATK				
2	1	2	5	1	2	- Penggandaan				
2	1	2	5	1	3	- Konsumsi Rapat				
2	1	2	5	1	4	- dst				
2	2					<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>				
2	2	1				Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	1			Belanja Barang dan jasa				
2	2	1	1	1		- Upah Kerja				
2	2	1	1	2		- Honor				
2	2	1	1	3		- dst.....				
2	2	1	2			Belanja Modal				
2	2	1	2	1		- Semen				
2	2	1	2	2		- Material				
2	2	1	2	3		- dst.....				
2	2					Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	1			Belanja Barang dan Jasa :				
2	2	2	1	1		- Upah Kerja				
2	2	2	1	2		- Honor				
2	2	2	1	3		- dst.....				
2	2	2	2			Belanja Modal:				
2	2	2	2	1		- Aspal				
2	2	2	2	2		- Pasir				

2	2	2	2	3		- dst					
2	2	3				Kegiatan.....dst					
2	3					<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>					
2	3	1				Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					
2	3	1	1			Belanja Barang dan Jasa:					
2	3	1	1	1		- Honor Pelatih					
2	3	1	1	2		- Konsumsi					
2	3	1	1	3		- Bahan Pelatihan					
2	3	1	1	4		- dst.....					
2	3	2				Kegiatan.....dst					
2	4					<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>					
2	4	1				Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	1	1			Belanja Barang dan Jasa:					
2	4	1	1	1		- Honor pelatih					
2	4	1	1	2		- Konsumsi					
2	4	1	1	3		- Bahan pelatihan					
2	4	1	1	4		- dst.....					
2	4	2				Kegiatan.....dst					
2	5					<u>Bidang Tak Terduga</u>					
2	5	1				Kegiatan Kejadian Luar Biasa					
2	5	1	1			Belanja Barang dan Jasa:					
2	5	1	1	1		- Honor tim					
2	5	1	1	2		- Konsumsi					
2	5	1	1	3		- Obat-obatan					
2	5	1	1	4		- dst.....					
2	5	2				Kegiatan.....dst					
2						JUMLAH BELANJA					
						SURPLUS / DEFISIT					
3						PEMBIAYAAN					
3	1					Penerimaan Pembiayaan					
3	1	1				SILPA					
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan					
3	1	2	1			Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa					
3	1	2	2			Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa					

3	1	2	2	1		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa				
3	1	2	2	2		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa				
3	1	2	2	3		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Seksi...				
3	1	2	2	4		dst....				
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
3	1					JUMLAH (RP)				
3										
3	2					<u>Pengeluaran Pembiayaan</u>				
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	1	1			Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa				
3	2	1	2			Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa				
3	2	1	2	1		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa				
3	2	1	2	2		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa				
3	2	1	2	3		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Seksi...				
3	2	1	2	4		dst....				
3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
3	2					JUMLAH (RP)				

KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANYUMAS

TTD

(.....)

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA



KEPALA DESA.....KECAMATAN....
KABUPATEN BANYUMAS

RANCANGAN PERATURAN DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran....;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan DesaKecamatan..... Kabupaten Banyumas tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang APBDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAKECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
 - e. Bidang Tak Terduga Rp.....
 - Jumlah Belanja Rp.....
 - Surplus/Defisit Rp.....
=====
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.
 - Selisih Pembiayaan (a – b) Rp.....
=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN
DESA...KECAMATAN...KABUPATEN BANYUMAS
NOMORTAHUN.....
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN APBDesa TAHUN
ANGGARAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
PEMERINTAH DESAKECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	KET
I						II	III	IV	V	VI
1						<u>PENDAPATAN DESA</u>				
1	1					<u>Pendapatan Asli Desa</u>				
1	1	1				<u>Hasil Usaha</u>				
1	1	1	1			Hasil Pengelolaan Aset Desa yang Dipisahkan				
1	1	1	1	1	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Desa /BUM Desa				
1	1	1	1	1	2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD				
1	1	1	1	1	3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah /BUMN				
1	1	1	1	1	4	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat				
1	1	1	2			Hasil eks-Bengkok Desa				
1	1	1	2	1		eks-Bengkok Kepala Desa				
1	1	1	2	2		eks-Bengkok Sekretaris Desa				
1	1	1	2	3		eks-Bengkok Kepala Dusun				
1	1	1	2	3	1	eks-Bengkok Kepala Dusun I				
1	1	1	2	3	2	eks-Bengkok Kepala Dusun II				
1	1	1	2	3	3	eks-Bengkok Kepala Dusun III				
1	1	1	2	3	4	dst...				
1	1	1	2	4		eks-Bengkok Kepala Seksi				
1	1	1	2	4	1	eks-Bengkok Kepala Seksi Pembangunan				
1	1	1	2	4	2	eks-Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan				
1	1	1	2	4	3	eks-Bengkok Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				

1	1	1	2	5		eks-Bengkok Kepala Urusan				
1	1	1	2	5	1	eks-Bengkok Kepala Urusan Keuangan				
1	1	1	2	5	2	eks-Bengkok Kepala Urusan Umum				
1	1	1	2	6		eks-Bengkok Staf/Pembantu				
1	1	1	2	6	1	eks-Bengkok Staf/Pembantu Kasi				
1	1	1	2	6	2	eks-Bengkok Staf/Pembantu Kaur				
1	1	1	2	6	3	dst...				
1	1	1	3			Iuran Dharma Tirta/Perkumpulan Petani Pemakai Air				
1	1	1	4			Hasil Tanah Kas Desa yang berasal dari Pembelian/Pengadaan yang dibiayai APBDesa				
1	1	1	5			Lain-lain Hasil Usaha Desa yang Sah				
1	1	2				<u>Hasil Aset Desa</u>				
1	1	2	1			Hasil Tanah Kas Desa Asli Kekayaan Desa				
1	1	2	1	1		Bondo Desa				
1	1	2	1	2		Dst...				
1	1	2	2			Hasil Pasar Desa				
1	1	2	2	1		Hasil Pasar Desa yang dikelola sendiri				
1	1	2	2	2		Dst.....				
1	1	2	3			Hasil Pasar Hewan Desa				
1	1	2	3	1		Hasil Pasar Hewan Desa yang dikelola sendiri				
1	1	2	4			Hasil Bangunan Desa				
1	1	2	4	1		Hasil Sewa Aula Desa/Gedung Pertemuan Desa				
1	1	2	4	2		Dst.....				
1	1	2	5			Objek Rekreasi Desa				
1	1	2	5	1		Retribusi Obyek Rekreasi				
1	1	2	5	2		Retribusi Parkir Obyek Rekreasi				
1	1	2	5	3		Dst.....				
1	1	2	6			Hasil Pemandian Umum Desa				
1	1	2	6	1		Retribusi Pemandian Umum Desa				
1	1	2	6	2		Dst.....				
1	1	2	7			Lain-lain Hasil Kekayaan Milik Desa				
1	1	2	7	1		Hasil Kios Desa				
1	1	2	7	2		Dst.....				
1	1	2	8			Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak Dipisahkan				

[illegible]

1	1	4	6			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan					
1	1	4	6	1		Kegiatan Pembuatan Jalan					
1	1	4	6	2		Kegiatan Pengaspalan Jalan					
1	1	4	6	3		Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi					
1	1	4	6	4		Kegiatan Rehabilitas Irigasi					
1	1	4	6	5		Kegiatan Pembuatan Jembatan					
1	1	4	6	6		Kegiatan Rehabilitas Jembatan					
1	1	4	6	7		Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa					
1	1	4	6	8		Kegiatan Rehabilitas Bangunan Desa					
1	1	4	6	9		Dst.....					
1	1	4	7			Pendapatan dari Pengembalian					
1	1	4	7	1		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan					
1	1	4	7	2		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
1	1	4	7	3		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas					
1	1	4	7	4		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan dari Uang Muka					
1	1	4	7	5		Dst.....					
1	1	4	9			Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan					
1	1	4	9	1		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan					
1	1	4	9	2		Dst.....					
1	2					<u>Pendapatan Transfer</u>					
1	2	1				<u>Dana Desa</u>					
1	2	2				<u>Bagian dari Hasil Pajak dan/atau Retribusi Daerah Kabupaten untuk Desa</u>					
1	2	3				<u>Alokasi Dana Desa (ADD)</u>					
1	2	4				<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi</u>					
1	2	4	1			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Umum					
1	2	4	2			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Khusus					
1	2	5				<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten</u>					
1	2	5	1			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Umum					

1	2	5	2			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Khusus					
1	3					<u>Pendapatan Lain-Lain</u>					
1	3	1				<u>Hibah</u>					
1	3	1	1			Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Dalam Desa					
1	3	1	1	1		Hibah dari Lembaga/Organisasi Negara Non Pemerintah					
1	3	1	1	2		Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta					
1	3	1	2			Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Luar Desa					
1	3	1	2	1		Hibah dari Lembaga/Organisasi Negara Non Pemerintah					
1	3	1	2	2		Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta					
1	3	2				Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam					
1	3	2	1			Dana Darurat Dari Pemerintah					
1	3	2	2			Dana Darurat Dari Pemerintah Provinsi					
1	3	2	3			Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten					
1	3	2	4			Dana Darurat Dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah					
1	3	3				Sumbangan Lainnya Yang Tidak Mengikat					
1	3	3	1			Hadiah					
1	3	3	1	1		Hadiah Lomba Desa					
1	3	3	1	2		Hadiah Lomba PKK					
1	3	3	1	3		Hadiah Lomba PBB					
1	3	3	1	4		Hadiah Lomba.....					
1	3	3	2			Donasi					
1	3	3	3			Lain-lain Sumbangan					
1						JUMLAH PENDAPATAN					
2						<u>BELANJA DESA</u>					
2	1					<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>					
2	1	1				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
2	1	1	1			Belanja Pegawai					
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa					
2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa					
2	1	1	1	1	2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa					

2	1	1	1	1	4	Penghasilan Tetap Kepala Dusun I				
2	1	1	1	1	5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun II				
2	1	1	1	1	6	Penghasilan Tetap Kepala Dusun III				
2	1	1	1	1	7	dst...				
2	1	1	1	1	9	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	1	10	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	1	11	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	1	13	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	1	14	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	1	16	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	1	17	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	1	18	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	1	19	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	1	20	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	1	21	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun I				
2	1	1	1	1	22	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun II				
2	1	1	1	1	23	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun III				
2	1	1	1	1	24	dst...				
2	1	1	1	2		Tunjangan-Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa				
2	1	1	1	2	1	Tunjangan Jabatan Kepala Desa				
2	1	1	1	2	2	Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	4	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	5	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	6	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	7	dst...				
2	1	1	1	2	9	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	10	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	11	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				

2	1	1	1	2	13	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	14	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	17	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	17	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	1	21	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun I				
2	1	1	1	1	22	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun II				
2	1	1	1	1	23	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	18	dst...				
2	1	1	1	2	19	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Desa				
2	1	1	1	2	20	Tunjangan Istri atau Suami Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	22	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	23	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	24	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	25	dst...				
2	1	1	1	2	27	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	28	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	29	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	31	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	32	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	35	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	36	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	37	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	39	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kaur Umum				

2	1	1	1	2	40	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	42	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus I				
2	1	1	1	2	43	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	44	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	45	dst...				
2	1	1	1	2	46	Tunjangan Anak Kepala Desa				
2	1	1	1	2	47	Tunjangan Anak Pertama Kepala Desa				
2	1	1	1	2	48	Tunjangan Anak Kedua Kepala Desa				
2	1	1	1	2	49	Tunjangan Anak Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	50	Tunjangan Anak Pertama Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	51	Tunjangan Anak Kedua Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	52	Tunjangan Anak Kepala Dusun				
2	1	1	1	2	53	Tunjangan Anak Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	54	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	55	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	56	Tunjangan Anak Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	57	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	58	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	59	Tunjangan Anak Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	60	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	61	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	62	dst...				
2	1	1	1	2	63	Tunjangan Anak Kepala Seksi				
2	1	1	1	2	64	Tunjangan Anak Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	65	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	66	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	67	Tunjangan Anak Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	68	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	69	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	70	Tunjangan Anak Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	71	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	72	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				

2	1	1	1	2	73	Tunjangan Anak Kepala Urusan				
2	1	1	1	2	74	Tunjangan Anak Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	75	Tunjangan Anak Pertama Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	76	Tunjangan Anak Kedua Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	77	Tunjangan Anak Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	78	Tunjangan Anak Pertama Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	79	Tunjangan Anak Kedua Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	80	Tunjangan Anak Staf/Pembantu				
2	1	1	1	2	81	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	82	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	83	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	84	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	85	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	86	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	87	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	88	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	89	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	90	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	2	91	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	2	92	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	2	93	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	94	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	95	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	96	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus I				
2	1	1	1	2	97	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus I				

2	1	1	1	2	98	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus I				
2	1	1	1	2	99	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	100	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	101	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	102	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	103	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	104	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	105	dst...				
2	1	1	1	2	106	Tunjangan Kesehatan Kepala Desa				
2	1	1	1	2	107	Tunjangan Kesehatan Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	108	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun				
2	1	1	1	2	109	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	110	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	111	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	112	dst...				
2	1	1	1	2	113	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi				
2	1	1	1	2	114	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	115	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	116	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	117	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan				
2	1	1	1	2	118	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	119	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan Umum				
2										
2	1	1	1	3		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa				
2	1	1	1	3	1	Tambahan Penghasilan Kepala Desa				
2	1	1	1	3	2	Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa				
2	1	1	1	3	3	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun				
2	1	1	1	3	4	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun I				
2	1	1	1	3	5	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun II				
2	1	1	1	3	6	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun III				
2	1	1	1	3	7	dst...				
2	1	1	1	3	8	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi				
2	1	1	1	3	9	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pembangunan				

2	1	1	1	3	10	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	3	11	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	3	12	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan				
2	1	1	1	3	13	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	3	14	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	3	15	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu				
2	1	1	1	3	16	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	3	17	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	3	18	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	3	19	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	3	20	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	3	21	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun I				
2	1	1	1	3	22	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun II				
2	1	1	1	3	23	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun III				
2	1	1	1	3	24	dst...				
2	1	1	1	4		Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
2	1	1	1	4	1	Tunjangan Ketua BPD				
2	1	1	1	4	2	Tunjangan Wakil Ketua BPD				
2	1	1	1	4	3	Tunjangan Bidang I BPD				
2	1	1	1	4	4	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	5	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	6	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	7	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	8	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	9	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	10	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	11	Tunjangan Anggota BPD				
						-				
2	1	2				Operasional Pemerintahan Desa				
2	1	2	1			Operasional Perkantoran				
2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	2	1		- Alat Tulis Kantor				

2	1	2	2	2		- Benda POS				
2	1	2	2	3		- Pakaian Dinas dfan Atribut				
2	1	2	2	4		- Pakaian Dinas				
2	1	2	2	5		- Alat dan Bahan Kebersihan				
2	1	2	2	6		- Perjalanan Dinas				
2	1	2	2	7		- Pemeliharaan				
2	1	2	2	8		- Air, Listrik,dasn Telepon				
2	1	2	2	9		- Honor				
2	1	2	2	10		- dst.....				
2	1	2	3			Belanja Modal				
2	1	2	3	1		- Komputer				
2	1	2	3	2		- Meja dan Kursi				
2	1	2	3	3		- Mesin TIK				
2	1	2	3	4		- Pengadaan Tanah Kas Desa				
2	1	2	3	5		- dst.....				
2	1	2	4			Operasional BPD				
2	1	2	4	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	4	1	1	- ATK				
2	1	2	4	1	2	- Penggandaan				
2	1	2	4	1	3	- Konsumsi Rapat				
2	1	2	4	1	4	- dst				
2	1	2	5			Operasional RT/ RW				
2	1	2	5	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	5	1	1	- ATK				
2	1	2	5	1	2	- Penggandaan				
2	1	2	5	1	3	- Konsumsi Rapat				
2	1	2	5	1	4	- dst				
2	2					<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>				
2	2	1				Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	1			Belanja Barang dan jasa				
2	2	1	1	1		- Upah Kerja				
2	2	1	1	2		- Honor				
2	2	1	1	3		- dst.....				
2	2	1	2			Belanja Modal				
2	2	1	2	1		- Semen				
2	2	1	2	2		- Material				
2	2	1	2	3		- dst.....				
2	2					Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	1			Belanja Barang dan Jasa :				
2	2	2	1	1		- Upah Kerja				
2	2	2	1	2		- Honor				
2	2	2	1	3		- dst.....				
2	2	2	2			Belanja Modal:				
2	2	2	2	1		- Aspal				
2	2	2	2	2		- Pasir				

2	2	2	2	3		- dst					
2	2	3				Kegiatan.....dst					
2	3					<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>					
2	3	1				Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Kertibn					
2	3	1	1			Belanja Barang dan Jasa:					
2	3	1	1	1		- Honor Pelatih					
2	3	1	1	2		- Konsumsi					
2	3	1	1	3		- Bahan Pelatihan					
2	3	1	1	4		- dst.....					
2	3	2				Kegiatan.....dst					
2	4					<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>					
2	4	1				Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	1	1			Belanja Barang dan Jasa:					
2	4	1	1	1		- Honor pelatih					
2	4	1	1	2		- Konsumsi					
2	4	1	1	3		- Bahan pelatihan					
2	4	1	1	4		- dst.....					
2	4	2				Kegiatan.....dst					
2	5					<u>Bidang Tak Terduga</u>					
2	5	1				Kegiatan Kejadian Luar Biasa					
2	5	1	1			Belanja Barang dan Jasa:					
2	5	1	1	1		- Honor tim					
2	5	1	1	2		- Konsumsi					
2	5	1	1	3		- Obat-obatan					
2	5	1	1	4		- dst.....					
2	5	2				Kegiatan.....dst					
2						JUMLAH BELANJA					
						SURPLUS / DEFISIT					
3						PEMBIAYAAN					
3	1					Penerimaan Pembiayaan					
3	1	1				SiLPA					
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan					
3	1	2	1			Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa					
3	1	2	2			Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa					

3	1	2	2	1		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa				
3	1	2	2	2		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa				
3	1	2	2	3		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Seksi...				
3	1	2	2	4		dst....				
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
3	1					JUMLAH (RP)				
3										
3	2					<u>Pengeluaran Pembiayaan</u>				
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	1	1			Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa				
3	2	1	2			Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa				
3	2	1	2	1		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa				
3	2	1	2	2		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa				
3	2	1	2	3		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Seksi...				
3	2	1	2	4		dst....				
3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
3	2					JUMLAH (RP)				

TANGGAL
TTD
(KEPALA DESA)

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN DESA
....KECAMATAN....KABUPATEN BANYUMAS
NOMORTAHUN.....
TENTANG
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - II)		

TANGGAL

TTD
(KEPALA DESA)

Penjelasan tabel:

1. *Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.*
2. *Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.*
3. *Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.*
4. *Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.*
5. *Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.*
6. *Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.*
7. *Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.*
8. *Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.*

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN
DESA...KECAMATAN....KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH
YANG MASUK KE DESA

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4) Total (1 s/d 4)							Rp. Rp.

tanggal,
Kepala Desa
(.....)

I. FORMAT NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN BPD
TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN APBDesa.

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa.....
Alamat Kantor :

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa....., selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

2. a. Nama :
Jabatan : Ketua BPD.....
Alamat Kantor :

b. Nama :
Jabatan : Wakil Ketua BPD.....
Alamat Kantor :

c. Nama :
Jabatan : Perwakilan Anggota BPD.....* 1)
Alamat Kantor :

bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa , selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa
- | | |
|---|----------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.....</u> |

Jumlah Belanja (a+b+c+d+e)	Rp..... -
Surplus/Defisit (1-2)	Rp.....
=====	
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

Secara lengkap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran yang disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.*2)

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran

Desa.....Kecamatan...., tanggal*3)

**KEPALA DESA
KECAMATAN ... KABUPATEN
BANYUMAS**

**selaku,
PIHAK PERTAMA**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN ... KABUPATEN BANYUMAS**

**selaku,
PIHAK KEDUA**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

KETUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

WAKIL KETUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

PERWAKILAN ANGGOTA

Penjelasan :

*1) : *dipilih yang menjabat pada Bidang Pemerintahan*

*2) : *sebagaimana dimaksud pada lampiran huruf A Peraturan Bupati ini*

*3) : *diisi tanggal pada saat Musyawarah BPD yang memutuskan menyepakati bersama Rancangan Perdes RAPBDesa*

J. FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBERIAN
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG
PEMDES

BADAN PERMUSYWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
Alamat :
Nomor Telepon : Faksimile :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...
KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Banyumas Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa Kepala Desa ... Kecamatan Kabupaten Banyumas telah menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran ... kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ... Kecamatan Kabupaten Banyumas pada tanggal;
- c. bahwa pada tanggal telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ... Kecamatan Kabupaten Banyumas untuk membahas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa ... Kecamatan Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ... Kecamatan Kabupaten Banyumas menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran

KEDUA : Pagu anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Banyumas Tahun Anggaranadalah sebagai berikut:

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA, NOTA KESEPAKATAN DAN KEPUTUSAN BPD

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa



KEPALA DESA.....KECAMATAN....
KABUPATEN BANYUMAS

RANCANGAN PERATURAN DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KECAMATAN.....KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan Kabupaten Banyumas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan DesaKecamatan..... Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)..... Kecamatan..... Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang APBDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
 9. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... |
| | ===== |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp..... |
| | ===== |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA
TTD
(NAMA TANPA TITLE)
.....

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DESA
....KECAMATAN ... KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN.....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING							URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
I							II	III	IV
1							<u>PENDAPATAN DESA</u>		
1	1						<u>Pendapatan Asli Desa</u>		
1	1	1					<u>Hasil Usaha</u>		
1	1	1	1				Hasil Pengelolaan Aset Desa yang Dipisahkan		
1	1	1	1	1	1	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Desa /BUM Desa		
1	1	1	1	1	1	2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD		
1	1	1	1	1	1	3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah /BUMN		
1	1	1	1	1	1	4	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat		
1	1	1	2				Hasil eks-Bengkok Desa		
1	1	1	2	1			eks-Bengkok Kepala Desa		
1	1	1	2	2			eks-Bengkok Sekretaris Desa		
1	1	1	2	3			eks-Bengkok Kepala Dusun		
1	1	1	2	3	1		eks-Bengkok Kepala Dusun I		

1	1	1	2	3	2	eks-Bengkok Kepala Dusun II		
1	1	1	2	3	3	eks-Bengkok Kepala Dusun III		
1	1	1	2	3	4	dst...		
1	1	1	2	4		eks-Bengkok Kepala Seksi		
1	1	1	2	4	1	eks-Bengkok Kepala Seksi Pembangunan		
1	1	1	2	4	2	eks-Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan		
1	1	1	2	4	3	eks-Bengkok Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
1	1	1	2	5		eks-Bengkok Kepala Urusan		
1	1	1	2	5	1	eks-Bengkok Kepala Urusan Keuangan		
1	1	1	2	5	2	eks-Bengkok Kepala Urusan Umum		
1	1	1	2	6		eks-Bengkok Staf/Pembantu		
1	1	1	2	6	1	eks-Bengkok Staf/Pembantu Kasi		
1	1	1	2	6	2	eks-Bengkok Staf/Pembantu Kaur		
1	1	1	2	6	3	dst...		
1	1	1	3			Iuran Dharma Tirta/Perkumpulan Petani Pemakai Air		
1	1	1	4			Hasil Tanah Kas Desa yang berasal dari Pembelian/Pengadaan yang dibiayai APBDesa		
1	1	1	5			Lain-lain Hasil Usaha Desa yang Sah		
1	1	2				Hasil Aset Desa		
1	1	2	1			Hasil Tanah Kas Desa Asli Kekayaan Desa		
1	1	2	1	1		Bondo Desa		
1	1	2	1	2		Dst...		
1	1	2	2			Hasil Pasar Desa		
1	1	2	2	1		Hasil Pasar Desa yang dikelola sendiri		
1	1	2	2	2		Dst.....		
1	1	2	3			Hasil Pasar Hewan Desa		
1	1	2	3	1		Hasil Pasar Hewan Desa yang dikelola sendiri		
1	1	2	4			Hasil Bangunan Desa		
1	1	2	4	1		Hasil Sewa Aula Desa/Gedung Pertemuan Desa		
1	1	2	4	2		Dst.....		
1	1	2	5			Objek Rekreasi Desa		
1	1	2	5	1		Retribusi Obyek Rekreasi		
1	1	2	5	2		Retribusi Parkir Obyek Rekreasi		
1	1	2	5	3		Dst.....		
1	1	2	6			Hasil Pemandian Umum Desa		
1	1	2	6	1		Retribusi Pemandian Umum Desa		
1	1	2	6	2		Dst.....		

1	1	2	7		Lain-lain Hasil Kekayaan Milik Desa		
1	1	2	7	1	Hasil Kios Desa		
1	1	2	7	2	Dst.....		
1	1	2	8		Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak Dipisahkan		
1	1	2	8	1	Pelepasan Hak Atas Tanah		
1	1	2	8	2	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak Terpakai		
1	1	2	8	3	Penjualan Drum Bekas		
1	1	2	8	4	Penjualan Hasil Penebangan Pohon		
1	1	2	8	5	Penjualan Bahan-bahan Bebekas Bangunan		
1	1	2	8	6	Penjualan Hasil Pertanian		
1	1	2	8	7	Penjualan Hasil Perkebunan		
1	1	2	8	8	Penjualan Hasil Peternakan		
1	1	2	8	9	Penjualan Hasil Perikanan		
1	1	2	8	10	Dst.....		
1	1	3			<u>Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat</u>		
1	1	3	1		Berupa uang tunai		
1	1	3	2		Berupa barang yang dinilai uang		
1	1	3	3		Berupa tenaga yang dinilai uang		
1	1	4			<u>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah</u>		
					-		
1	1	4	1		Pungutan Desa (harus ada Perdesnya)		
1	1	4	1	1	Pungutan Desa atas....		
1	1	4	1	2	Pungutan Desa atas.... Dst		
1	1	4	2		Jasa Giro		
1	1	4	2	1	Jasa Giro Kas Desa		
1	1	4	2	2	Jasa Giro Pemegang Kas		
1	1	4	2	3	Jasa Giro Dana Cadangan		
1	1	4	2	4	Dst.....		
1	1	4	3		Pendapatan Bunga Deposito		
1	1	4	3	1	Rekening Deposito pada Bank.....		
1	1	4	3	2	Dst.....		
1	1	4	4		Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa		
1	1	4	4	1	Kerugian Uang Desa		
1	1	4	4	2	Kerugian Barang Desa		
1	1	4	4	3	Dst.....		

1	1	4	5		Penerimaan Komisi, Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau Jasa oleh Desa		
1	1	4	5	1	Penerimaan Komisi dari		
1	1	4	5	2	Penerimaan Potongan dari		
1	1	4	5	3	Dst		
1	1	4	6		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
1	1	4	6	1	Kegiatan Pembuatan Jalan		
1	1	4	6	2	Kegiatan Pengaspalan Jalan		
1	1	4	6	3	Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi		
1	1	4	6	4	Kegiatan Rehabilitas Irigasi		
1	1	4	6	5	Kegiatan Pembuatan Jembatan		
1	1	4	6	6	Kegiatan Rehabilitas Jembatan		
1	1	4	6	7	Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa		
1	1	4	6	8	Kegiatan Rehabilitas Bangunan Desa		
1	1	4	6	9	Dst.....		
1	1	4	7		Pendapatan dari Pengembalian		
1	1	4	7	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan		
1	1	4	7	2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
1	1	4	7	3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas		
1	1	4	7	4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan dari Uang Muka		
1	1	4	7	5	Dst.....		
1	1	4	9		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
1	1	4	9	1	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
1	1	4	9	2	Dst.....		
1	2				<u>Pendapatan Transfer</u>		
1	2	1			<u>Dana Desa</u>		
1	2	2			<u>Bagian dari Hasil Pajak dan/atau Retribusi Daerah Kabupaten untuk Desa</u>		
1	2	3			<u>Alokasi Dana Desa (ADD)</u>		
1	2	4			<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi</u>		
1	2	4	1		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Umum		

1	2	4	2		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Khusus		
1	2	5			<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten</u>		
1	2	5	1		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Umum		
1	2	5	2		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Khusus		
1	3				<u>Pendapatan Lain-Lain</u>		
1	3	1			<u>Hibah</u>		
1	3	1	1		Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Dalam Desa		
1	3	1	1	1	Hibah dari Lembaga/Organisasi Negara Non Pemerintah		
1	3	1	1	2	Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta		
1	3	1	2		Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Luar Desa		
1	3	1	2	1	Hibah dari Lembaga/Organisasi Negara Non Pemerintah		
1	3	1	2	2	Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta		
1	3	2			Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam		
1	3	2	1		Dana Darurat Dari Pemerintah		
1	3	2	2		Dana Darurat Dari Pemerintah Provinsi		
1	3	2	3		Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten		
1	3	2	4		Dana Darurat Dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah		
1	3	3			Sumbangan Lainnya Yang Tidak Mengikat		
1	3	3	1		Hadiah		
1	3	3	1	1	Hadiah Lomba Desa		
1	3	3	1	2	Hadiah Lomba PKK		
1	3	3	1	3	Hadiah Lomba PBB		
1	3	3	1	4	Hadiah Lomba.....		
1	3	3	2		Donasi		
1	3	3	3		Lain-lain Sumbangan		
1					JUMLAH PENDAPATAN		
2					<u>BELANJA DESA</u>		
2	1				<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>		

2	1	1				Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1			Belanja Pegawai		
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa		
2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa		
2	1	1	1	1	2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa		
2	1	1	1	1	4	Penghasilan Tetap Kepala Dusun I		
2	1	1	1	1	5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun II		
2	1	1	1	1	6	Penghasilan Tetap Kepala Dusun III		
2	1	1	1	1	7	dst...		
2	1	1	1	1	9	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pembangunan		
2	1	1	1	1	10	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pemerintahan		
2	1	1	1	1	11	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	1	13	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan		
2	1	1	1	1	14	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum		
2	1	1	1	1	16	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Pembangunan		
2	1	1	1	1	17	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan		
2	1	1	1	1	18	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	1	19	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Umum		
2	1	1	1	1	20	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Keuangan		
2	1	1	1	1	21	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun I		
2	1	1	1	1	22	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun II		
2	1	1	1	1	23	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun III		
2	1	1	1	1	24	dst...		
2	1	1	1	2		Tunjangan-Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa		
2	1	1	1	2	1	Tunjangan Jabatan Kepala Desa		
2	1	1	1	2	2	Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa		
2	1	1	1	2	4	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun I		
2	1	1	1	2	5	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun II		
2	1	1	1	2	6	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun III		
2	1	1	1	2	7	dst...		
2	1	1	1	2	9	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Pembangunan		

2	1	1	1	2	10	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	11	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	13	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Keuangan		
2	1	1	1	2	14	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Umum		
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Pembangunan		
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	17	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kaur Keuangan		
2	1	1	1	2	17	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kaur Umum		
2	1	1	1	1	21	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun I		
2	1	1	1	1	22	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun II		
2	1	1	1	1	23	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun III		
2	1	1	1	2	18	dst...		
2	1	1	1	2	19	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Desa		
2	1	1	1	2	20	Tunjangan Istri atau Suami Sekretaris Desa		
2	1	1	1	2	22	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun I		
2	1	1	1	2	23	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun II		
2	1	1	1	2	24	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun III		
2	1	1	1	2	25	dst...		
2	1	1	1	2	27	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Pembangunan		
2	1	1	1	2	28	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	29	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	31	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Urusan Keuangan		
2	1	1	1	2	32	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Urusan Umum		
2	1	1	1	2	35	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Pembangunan		

2	1	1	1	2	36	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	37	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	39	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kaur Umum		
2	1	1	1	2	40	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kaur Keuangan		
2	1	1	1	2	42	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus I		
2	1	1	1	2	43	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus II		
2	1	1	1	2	44	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus III		
2	1	1	1	2	45	dst...		
2	1	1	1	2	46	Tunjangan Anak Kepala Desa		
2	1	1	1	2	47	Tunjangan Anak Pertama Kepala Desa		
2	1	1	1	2	48	Tunjangan Anak Kedua Kepala Desa		
2	1	1	1	2	49	Tunjangan Anak Sekretaris Desa		
2	1	1	1	2	50	Tunjangan Anak Pertama Sekretaris Desa		
2	1	1	1	2	51	Tunjangan Anak Kedua Sekretaris Desa		
2	1	1	1	2	52	Tunjangan Anak Kepala Dusun		
2	1	1	1	2	53	Tunjangan Anak Kepala Dusun I		
2	1	1	1	2	54	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun I		
2	1	1	1	2	55	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun I		
2	1	1	1	2	56	Tunjangan Anak Kepala Dusun II		
2	1	1	1	2	57	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun II		
2	1	1	1	2	58	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun II		
2	1	1	1	2	59	Tunjangan Anak Kepala Dusun III		
2	1	1	1	2	60	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun III		
2	1	1	1	2	61	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun III		
2	1	1	1	2	62	dst...		
2	1	1	1	2	63	Tunjangan Anak Kepala Seksi		
2	1	1	1	2	64	Tunjangan Anak Kepala Seksi Pembangunan		
2	1	1	1	2	65	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Pembangunan		
2	1	1	1	2	66	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Pembangunan		
2	1	1	1	2	67	Tunjangan Anak Kepala Seksi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	68	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	69	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Pemerintahan		

2	1	1	1	2	70	Tunjangan Anak Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	71	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	72	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	73	Tunjangan Anak Kepala Urusan		
2	1	1	1	2	74	Tunjangan Anak Kepala Urusan Keuangan		
2	1	1	1	2	75	Tunjangan Anak Pertama Kepala Urusan Keuangan		
2	1	1	1	2	76	Tunjangan Anak Kedua Kepala Urusan Keuangan		
2	1	1	1	2	77	Tunjangan Anak Kepala Urusan Umum		
2	1	1	1	2	78	Tunjangan Anak Pertama Kepala Urusan Umum		
2	1	1	1	2	79	Tunjangan Anak Kedua Kepala Urusan Umum		
2	1	1	1	2	80	Tunjangan Anak Staf/Pembantu		
2	1	1	1	2	81	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Pembangunan		
2	1	1	1	2	82	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Pembangunan		
2	1	1	1	2	83	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Pembangunan		
2	1	1	1	2	84	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	85	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	86	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	87	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	88	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	89	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	90	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kaur Umum		
2	1	1	1	2	91	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kaur Umum		
2	1	1	1	2	92	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kaur Umum		

2	1	1	1	2	93	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kaur Keuangan		
2	1	1	1	2	94	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kaur Keuangan		
2	1	1	1	2	95	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kaur Keuangan		
2	1	1	1	2	96	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus I		
2	1	1	1	2	97	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus I		
2	1	1	1	2	98	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus I		
2	1	1	1	2	99	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus II		
2	1	1	1	2	100	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus II		
2	1	1	1	2	101	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus II		
2	1	1	1	2	102	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus III		
2	1	1	1	2	103	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus III		
2	1	1	1	2	104	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus III		
2	1	1	1	2	105	dst...		
2	1	1	1	2	106	Tunjangan Kesehatan Kepala Desa		
2	1	1	1	2	107	Tunjangan Kesehatan Sekretaris Desa		
2	1	1	1	2	108	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun		
2	1	1	1	2	109	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun I		
2	1	1	1	2	110	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun II		
2	1	1	1	2	111	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun III		
2	1	1	1	2	112	dst...		
2	1	1	1	2	113	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi		
2	1	1	1	2	114	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Pembangunan		
2	1	1	1	2	115	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Pemerintahan		
2	1	1	1	2	116	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	2	117	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan		
2	1	1	1	2	118	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan Keuangan		
2	1	1	1	2	119	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan Umum		
2								
2	1	1	1	3		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa		
2	1	1	1	3	1	Tambahan Penghasilan Kepala Desa		

2	1	1	1	3	2	Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa		
2	1	1	1	3	3	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun		
2	1	1	1	3	4	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun I		
2	1	1	1	3	5	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun II		
2	1	1	1	3	6	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun III		
2	1	1	1	3	7	dst...		
2	1	1	1	3	8	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi		
2	1	1	1	3	9	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pembangunan		
2	1	1	1	3	10	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pemerintahan		
2	1	1	1	3	11	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	3	12	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan		
2	1	1	1	3	13	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Keuangan		
2	1	1	1	3	14	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Umum		
2	1	1	1	3	15	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu		
2	1	1	1	3	16	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Pembangunan		
2	1	1	1	3	17	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan		
2	1	1	1	3	18	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	1	1	1	3	19	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kaur Umum		
2	1	1	1	3	20	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kaur Keuangan		
2	1	1	1	3	21	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun I		
2	1	1	1	3	22	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun II		
2	1	1	1	3	23	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun III		
2	1	1	1	3	24	dst...		
2	1	1	1	4		Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		
2	1	1	1	4	1	Tunjangan Ketua BPD		
2	1	1	1	4	2	Tunjangan Wakil Ketua BPD		
2	1	1	1	4	3	Tunjangan Bidang I BPD		
2	1	1	1	4	4	Tunjangan Bidang ... BPD		
2	1	1	1	4	5	Tunjangan Bidang ... BPD		
2	1	1	1	4	6	Tunjangan Bidang ... BPD		
2	1	1	1	4	7	Tunjangan Anggota BPD		
2	1	1	1	4	8	Tunjangan Anggota BPD		

2	1	1	1	4	9	Tunjangan Anggota BPD		
2	1	1	1	4	10	Tunjangan Anggota BPD		
2	1	1	1	4	11	Tunjangan Anggota BPD		
						-		
2	1	2				Operasional Pemerintahan Desa		
2	1	2	1			Operasional Perkantoran		
2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa		
2	1	2	2	1		- Alat Tulis Kantor		
2	1	2	2	2		- Benda POS		
2	1	2	2	3		- Pakaian Dinas dfan Atribut		
2	1	2	2	4		- Pakaian Dinas		
2	1	2	2	5		- Alat dan Bahan Kebersihan		
2	1	2	2	6		- Perjalanan Dinas		
2	1	2	2	7		- Pemeliharaan		
2	1	2	2	8		- Air, Listrik,dasn Telepon		
2	1	2	2	9		- Honor		
2	1	2	2	10		- dst.....		
2	1	2	3			Belanja Modal		
2	1	2	3	1		- Komputer		
2	1	2	3	2		- Meja dan Kursi		
2	1	2	3	3		- Mesin TIK		
2	1	2	3	4		- Pengadaan Tanah Kas Desa		
2	1	2	3	5		- dst.....		
2	1	2	4			Operasional BPD		
2	1	2	4	1		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	2	4	1	1	- ATK		
2	1	2	4	1	2	- Penggandaan		
2	1	2	4	1	3	- Konsumsi Rapat		
2	1	2	4	1	4	- dst		
2	1	2	5			Operasional RT/ RW		
2	1	2	5	1		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	2	5	1	1	- ATK		
2	1	2	5	1	2	- Penggandaan		
2	1	2	5	1	3	- Konsumsi Rapat		
2	1	2	5	1	4	- dst		
2	2					<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>		
2	2	1				Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	1			Belanja Barang dan jasa		
2	2	1	1	1		- Upah Kerja		
2	2	1	1	2		- Honor		
2	2	1	1	3		- dst.....		
2	2	1	2			Belanja Modal		
2	2	1	2	1		- Semen		
2	2	1	2	2		- Material		
2	2	1	2	3		- dst.....		
2	2					Pengaspalan jalan desa		

2	2	2	1		Belanja Barang dan Jasa :		
2	2	2	1	1	- Upah Kerja		
2	2	2	1	2	- Honor		
2	2	2	1	3	- dst.....		
2	2	2	2		Belanja Modal:		
2	2	2	2	1	- Aspal		
2	2	2	2	2	- Pasir		
2	2	2	2	3	- dst		
2	2	3			Kegiatan.....dst		
2	3				<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>		
2	3	1			Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	1		Belanja Barang dan Jasa:		
2	3	1	1	1	- Honor Pelatih		
2	3	1	1	2	- Konsumsi		
2	3	1	1	3	- Bahan Pelatihan		
2	3	1	1	4	- dst.....		
2	3	2			Kegiatan.....dst		
2	4				<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>		
2	4	1			Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	1		Belanja Barang dan Jasa:		
2	4	1	1	1	- Honor pelatih		
2	4	1	1	2	- Konsumsi		
2	4	1	1	3	- Bahan pelatihan		
2	4	1	1	4	- dst.....		
2	4	2			Kegiatan.....dst		
2	5				<u>Bidang Tak Terduga</u>		
2	5	1			Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	1		Belanja Barang dan Jasa:		
2	5	1	1	1	- Honor tim		
2	5	1	1	2	- Konsumsi		
2	5	1	1	3	- Obat-obatan		
2	5	1	1	4	- dst.....		
2	5	2			Kegiatan.....dst		
2					<u>JUMLAH BELANJA</u>		
					<u>SURPLUS / DEFISIT</u>		
3					<u>PEMBIAYAAN</u>		

3	1						<u>Penerimaan Pembiayaan</u>		
3	1	1					SiLPA		
3	1	2					Pencairan Dana Cadangan		
3	1	2	1				Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa		
3	1	2	2				Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa		
3	1	2	2	1			Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa		
3	1	2	2	2			Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa		
3	1	2	2	3			Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Seksi...		
3	1	2	2	4			dst....		
3	1	3					Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
3	1						JUMLAH (RP)		
3									
3	2						<u>Pengeluaran Pembiayaan</u>		
3	2	1					Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	1	1				Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa		
3	2	1	2				Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa		
3	2	1	2	1			Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa		
3	2	1	2	2			Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa		
3	2	1	2	3			Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Seksi...		
3	2	1	2	4			dst....		
3	2	2					Penyertaan Modal Desa		
3	2						JUMLAH (RP)		

KEPALA DESA.....KECAMATAN....
KABUPATEN BANYUMAS

TTD

(NAMA TANPA TITLE)

B. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATANKABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA..... KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :

2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa.....

.....,Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

.....

.....

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,tanggal
Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

F. Format Penatausahaan

1. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				Rp.	Rp.			

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

3. Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA
 DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN

BULAN :
 BANK CABANG :
 REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

....., tanggal
 BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
- Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
- Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
- Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
- Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
- Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.
- Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
- Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
- Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
- Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	KET
I						II	III	IV	V	VI
1						<u>PENDAPATAN DESA</u>				
1	1					<u>Pendapatan Asli Desa</u>				
1	1	1				<u>Hasil Usaha</u>				
1	1	1	1			Hasil Pengelolaan Aset Desa yang Dipisahkan				
1	1	1	1	1	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Desa /BUM Desa				
1	1	1	1	1	2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD				
1	1	1	1	1	3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah /BUMN				
1	1	1	1	1	4	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat				
1	1	1	2			Hasil eks-Bengkok Desa				
1	1	1	2	1		eks-Bengkok Kepala Desa				
1	1	1	2	2		eks-Bengkok Sekretaris Desa				
1	1	1	2	3		eks-Bengkok Kepala Dusun				
1	1	1	2	3	1	eks-Bengkok Kepala Dusun I				
1	1	1	2	3	2	eks-Bengkok Kepala Dusun II				
1	1	1	2	3	3	eks-Bengkok Kepala Dusun III				
1	1	1	2	3	4	dst...				
1	1	1	2	4		eks-Bengkok Kepala Seksi				
1	1	1	2	4	1	eks-Bengkok Kepala Seksi Pembangunan				
1	1	1	2	4	2	eks-Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan				
1	1	1	2	4	3	eks-Bengkok Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
1	1	1	2	5		eks-Bengkok Kepala Urusan				

1	1	1	2	5	1	eks-Bengkok Kepala Urusan Keuangan				
1	1	1	2	5	2	eks-Bengkok Kepala Urusan Umum				
1	1	1	2	6		eks-Bengkok Staf/Pembantu				
1	1	1	2	6	1	eks-Bengkok Staf/Pembantu Kasi				
1	1	1	2	6	2	eks-Bengkok Staf/Pembantu Kaur				
1	1	1	2	6	3	dst...				
1	1	1	3			Iuran Dharma Tirta/Perkumpulan Petani Pemakai Air				
1	1	1	4			Hasil Tanah Kas Desa yang berasal dari Pembelian/Pengadaan yang dibiayai APBDesa				
1	1	1	5			Lain-lain Hasil Usaha Desa yang Sah				
1	1	2				<u>Hasil Aset Desa</u>				
1	1	2	1			Hasil Tanah Kas Desa Asli Kekayaan Desa				
1	1	2	1	1		Bondo Desa				
1	1	2	1	2		Dst...				
1	1	2	2			Hasil Pasar Desa				
1	1	2	2	1		Hasil Pasar Desa yang dikelola sendiri				
1	1	2	2	2		Dst.....				
1	1	2	3			Hasil Pasar Hewan Desa				
1	1	2	3	1		Hasil Pasar Hewan Desa yang dikelola sendiri				
1	1	2	4			Hasil Bangunan Desa				
1	1	2	4	1		Hasil Sewa Aula Desa/Gedung Pertemuan Desa				
1	1	2	4	2		Dst.....				
1	1	2	5			Objek Rekreasi Desa				
1	1	2	5	1		Retribusi Obyek Rekreasi				
1	1	2	5	2		Retribusi Parkir Obyek Rekreasi				
1	1	2	5	3		Dst.....				
1	1	2	6			Hasil Pemandian Umum Desa				
1	1	2	6	1		Retribusi Pemandian Umum Desa				
1	1	2	6	2		Dst.....				
1	1	2	7			Lain-lain Hasil Kekayaan Milik Desa				
1	1	2	7	1		Hasil Kios Desa				
1	1	2	7	2		Dst.....				
1	1	2	8			Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak Dipisahkan				
1	1	2	8	1		Pelepasan Hak Atas Tanah				

[illegible]

1	1	4	6			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan					
1	1	4	6	1		Kegiatan Pembuatan Jalan					
1	1	4	6	2		Kegiatan Pengaspalan Jalan					
1	1	4	6	3		Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi					
1	1	4	6	4		Kegiatan Rehabilitas Irigasi					
1	1	4	6	5		Kegiatan Pembuatan Jembatan					
1	1	4	6	6		Kegiatan Rehabilitas Jembatan					
1	1	4	6	7		Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa					
1	1	4	6	8		Kegiatan Rehabilitas Bangunan Desa					
1	1	4	6	9		Dst.....					
1	1	4	7			Pendapatan dari Pengembalian					
1	1	4	7	1		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan					
1	1	4	7	2		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
1	1	4	7	3		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas					
1	1	4	7	4		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan dari Uang Muka					
1	1	4	7	5		Dst.....					
1	1	4	9			Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan					
1	1	4	9	1		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan					
1	1	4	9	2		Dst.....					
1	2					<u>Pendapatan Transfer</u>					
1	2	1				<u>Dana Desa</u>					
1	2	2				<u>Bagian dari Hasil Pajak dan/atau Retribusi Daerah Kabupaten untuk Desa</u>					
1	2	3				<u>Alokasi Dana Desa (ADD)</u>					
1	2	4				<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi</u>					
1	2	4	1			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Umum					
1	2	4	2			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Khusus					
1	2	5				<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten</u>					
1	2	5	1			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Umum					

1	2	5	2			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Khusus					
1	3					<u>Pendapatan Lain-Lain</u>					
1	3	1				<u>Hibah</u>					
1	3	1	1			Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Dalam Desa					
1	3	1	1	1		Hibah dari Lembaga/Organisasi Negara Non Pemerintah					
1	3	1	1	2		Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta					
1	3	1	2			Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Luar Desa					
1	3	1	2	1		Hibah dari Lembaga/Organisasi Negara Non Pemerintah					
1	3	1	2	2		Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta					
1	3	2				Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam					
1	3	2	1			Dana Darurat Dari Pemerintah					
1	3	2	2			Dana Darurat Dari Pemerintah Provinsi					
1	3	2	3			Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten					
1	3	2	4			Dana Darurat Dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah					
1	3	3				Sumbangan Lainnya Yang Tidak Mengikat					
1	3	3	1			Hadiah					
1	3	3	1	1		Hadiah Lomba Desa					
1	3	3	1	2		Hadiah Lomba PKK					
1	3	3	1	3		Hadiah Lomba PBB					
1	3	3	1	4		Hadiah Lomba.....					
1	3	3	2			Donasi					
1	3	3	3			Lain-lain Sumbangan					
1						JUMLAH PENDAPATAN					
2						<u>BELANJA DESA</u>					
2	1					<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>					
2	1	1				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
2	1	1	1			Belanja Pegawai					
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa					
2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa					
2	1	1	1	1	2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa					

2	1	1	1	1	4	Penghasilan Tetap Kepala Dusun I				
2	1	1	1	1	5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun II				
2	1	1	1	1	6	Penghasilan Tetap Kepala Dusun III				
2	1	1	1	1	7	dst...				
2	1	1	1	1	9	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	1	10	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	1	11	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	1	13	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	1	14	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	1	16	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	1	17	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	1	18	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	1	19	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	1	20	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	1	21	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun I				
2	1	1	1	1	22	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun II				
2	1	1	1	1	23	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun III				
2	1	1	1	1	24	dst...				
2	1	1	1	2		Tunjangan-Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa				
2	1	1	1	2	1	Tunjangan Jabatan Kepala Desa				
2	1	1	1	2	2	Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	4	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	5	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	6	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	7	dst...				
2	1	1	1	2	9	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	10	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	11	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				

2	1	1	1	2	13	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	14	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	17	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	17	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	1	21	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun I				
2	1	1	1	1	22	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun II				
2	1	1	1	1	23	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	18	dst...				
2	1	1	1	2	19	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Desa				
2	1	1	1	2	20	Tunjangan Istri atau Suami Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	22	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	23	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	24	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	25	dst...				
2	1	1	1	2	27	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	28	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	29	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	31	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	32	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	35	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	36	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	37	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	39	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kaur Umum				

2	1	1	1	2	40	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	42	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus I				
2	1	1	1	2	43	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	44	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	45	dst...				
2	1	1	1	2	46	Tunjangan Anak Kepala Desa				
2	1	1	1	2	47	Tunjangan Anak Pertama Kepala Desa				
2	1	1	1	2	48	Tunjangan Anak Kedua Kepala Desa				
2	1	1	1	2	49	Tunjangan Anak Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	50	Tunjangan Anak Pertama Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	51	Tunjangan Anak Kedua Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	52	Tunjangan Anak Kepala Dusun				
2	1	1	1	2	53	Tunjangan Anak Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	54	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	55	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	56	Tunjangan Anak Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	57	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	58	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	59	Tunjangan Anak Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	60	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	61	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	62	dst...				
2	1	1	1	2	63	Tunjangan Anak Kepala Seksi				
2	1	1	1	2	64	Tunjangan Anak Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	65	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	66	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	67	Tunjangan Anak Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	68	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	69	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	70	Tunjangan Anak Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	71	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	72	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				

2	1	1	1	2	73	Tunjangan Anak Kepala Urusan				
2	1	1	1	2	74	Tunjangan Anak Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	75	Tunjangan Anak Pertama Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	76	Tunjangan Anak Kedua Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	77	Tunjangan Anak Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	78	Tunjangan Anak Pertama Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	79	Tunjangan Anak Kedua Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	80	Tunjangan Anak Staf/Pembantu				
2	1	1	1	2	81	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	82	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	83	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	84	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	85	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	86	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	87	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	88	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	89	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	90	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	2	91	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	2	92	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	2	93	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	94	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	95	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	96	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus I				
2	1	1	1	2	97	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus I				

2	1	1	1	2	98	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus I				
2	1	1	1	2	99	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	100	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	101	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	102	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	103	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	104	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	105	dst...				
2	1	1	1	2	106	Tunjangan Kesehatan Kepala Desa				
2	1	1	1	2	107	Tunjangan Kesehatan Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	108	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun				
2	1	1	1	2	109	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	110	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	111	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	112	dst...				
2	1	1	1	2	113	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi				
2	1	1	1	2	114	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	115	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	116	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	117	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan				
2	1	1	1	2	118	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	119	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan Umum				
2										
2	1	1	1	3		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa				
2	1	1	1	3	1	Tambahan Penghasilan Kepala Desa				
2	1	1	1	3	2	Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa				
2	1	1	1	3	3	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun				
2	1	1	1	3	4	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun I				
2	1	1	1	3	5	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun II				
2	1	1	1	3	6	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun III				
2	1	1	1	3	7	dst...				
2	1	1	1	3	8	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi				
2	1	1	1	3	9	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pembangunan				

2	1	1	1	3	10	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	3	11	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	3	12	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan				
2	1	1	1	3	13	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	3	14	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	3	15	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu				
2	1	1	1	3	16	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	3	17	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	3	18	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	3	19	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	3	20	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	3	21	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun I				
2	1	1	1	3	22	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun II				
2	1	1	1	3	23	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun III				
2	1	1	1	3	24	dst...				
2	1	1	1	4		Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
2	1	1	1	4	1	Tunjangan Ketua BPD				
2	1	1	1	4	2	Tunjangan Wakil Ketua BPD				
2	1	1	1	4	3	Tunjangan Bidang I BPD				
2	1	1	1	4	4	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	5	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	6	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	7	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	8	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	9	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	10	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	11	Tunjangan Anggota BPD				
						-				
2	1	2				Operasional Pemerintahan Desa				
2	1	2	1			Operasional Perkantoran				
2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	2	1		- Alat Tulis Kantor				

2	1	2	2	2		- Benda POS				
2	1	2	2	3		- Pakaian Dinas dfan Atribut				
2	1	2	2	4		- Pakaian Dinas				
2	1	2	2	5		- Alat dan Bahan Kebersihan				
2	1	2	2	6		- Perjalanan Dinas				
2	1	2	2	7		- Pemeliharaan				
2	1	2	2	8		- Air, Listrik,dasn Telepon				
2	1	2	2	9		- Honor				
2	1	2	2	10		- dst.....				
2	1	2	3			Belanja Modal				
2	1	2	3	1		- Komputer				
2	1	2	3	2		- Meja dan Kursi				
2	1	2	3	3		- Mesin TIK				
2	1	2	3	4		- Pengadaan Tanah Kas Desa				
2	1	2	3	5		- dst.....				
2	1	2	4			Operasional BPD				
2	1	2	4	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	4	1	1	- ATK				
2	1	2	4	1	2	- Penggandaan				
2	1	2	4	1	3	- Konsumsi Rapat				
2	1	2	4	1	4	- dst				
2	1	2	5			Operasional RT/ RW				
2	1	2	5	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	5	1	1	- ATK				
2	1	2	5	1	2	- Penggandaan				
2	1	2	5	1	3	- Konsumsi Rapat				
2	1	2	5	1	4	- dst				
2	2					<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>				
2	2	1				Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	1			Belanja Barang dan jasa				
2	2	1	1	1		- Upah Kerja				
2	2	1	1	2		- Honor				
2	2	1	1	3		- dst.....				
2	2	1	2			Belanja Modal				
2	2	1	2	1		- Semen				
2	2	1	2	2		- Material				
2	2	1	2	3		- dst.....				
2	2					Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	1			Belanja Barang dan Jasa :				
2	2	2	1	1		- Upah Kerja				
2	2	2	1	2		- Honor				
2	2	2	1	3		- dst.....				
2	2	2	2			Belanja Modal:				
2	2	2	2	1		- Aspal				
2	2	2	2	2		- Pasir				

2	2	2	2	3		- dst					
2	2	3				Kegiatan.....dst					
2	3					<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>					
2	3	1				Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					
2	3	1	1			Belanja Barang dan Jasa:					
2	3	1	1	1		- Honor Pelatih					
2	3	1	1	2		- Konsumsi					
2	3	1	1	3		- Bahan Pelatihan					
2	3	1	1	4		- dst.....					
2	3	2				Kegiatan.....dst					
2	4					<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>					
2	4	1				Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	1	1			Belanja Barang dan Jasa:					
2	4	1	1	1		- Honor pelatih					
2	4	1	1	2		- Konsumsi					
2	4	1	1	3		- Bahan pelatihan					
2	4	1	1	4		- dst.....					
2	4	2				Kegiatan.....dst					
2	5					<u>Bidang Tak Terduka</u>					
2	5	1				Kegiatan Kejadian Luar Biasa					
2	5	1	1			Belanja Barang dan Jasa:					
2	5	1	1	1		- Honor tim					
2	5	1	1	2		- Konsumsi					
2	5	1	1	3		- Obat-obatan					
2	5	1	1	4		- dst.....					
2	5	2				Kegiatan.....dst					
2						JUMLAH BELANJA					
						SURPLUS / DEFISIT					
3						PEMBIAYAAN					
3	1					Penerimaan Pembiayaan					
3	1	1				SiLPA					
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan					
3	1	2	1			Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa					
3	1	2	2			Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa					

3	1	2	2	1		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa					
3	1	2	2	2		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa					
3	1	2	2	3		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Seksi...					
3	1	2	2	4		dst....					
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan					
3	1					JUMLAH (RP)					
3											
3	2					<u>Pengeluaran Pembiayaan</u>					
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan					
3	2	1	1			Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa					
3	2	1	2			Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa					
3	2	1	2	1		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa					
3	2	1	2	2		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa					
3	2	1	2	3		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Seksi...					
3	2	1	2	4		dst....					
3	2	2				Penyertaan Modal Desa					
3	2					JUMLAH (RP)					

KEPALA DESA

TTD

(.....)

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA...KECAMATAN.....KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	KET
I						II	III	IV	V	VI
						<u>PINDAHAN SALDO (DARI SEMESTER PERTAMA)</u>				
1						<u>PENDAPATAN DESA</u>				
1	1					<u>Pendapatan Asli Desa</u>				
1	1	1				<u>Hasil Usaha</u>				
1	1	1	1			Hasil Pengelolaan Aset Desa yang Dipisahkan				
1	1	1	1	1	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Desa /BUM Desa				
1	1	1	1	1	2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD				
1	1	1	1	1	3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah /BUMN				
1	1	1	1	1	4	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat				
1	1	1	2			Hasil eks-Bengkok Desa				
1	1	1	2	1		eks-Bengkok Kepala Desa				
1	1	1	2	2		eks-Bengkok Sekretaris Desa				
1	1	1	2	3		eks-Bengkok Kepala Dusun				
1	1	1	2	3	1	eks-Bengkok Kepala Dusun I				
1	1	1	2	3	2	eks-Bengkok Kepala Dusun II				
1	1	1	2	3	3	eks-Bengkok Kepala Dusun III				
1	1	1	2	3	4	dst...				
1	1	1	2	4		eks-Bengkok Kepala Seksi				
1	1	1	2	4	1	eks-Bengkok Kepala Seksi Pembangunan				
1	1	1	2	4	2	eks-Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan				
1	1	1	2	4	3	eks-Bengkok Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
1	1	1	2	5		eks-Bengkok Kepala Urusan				
1	1	1	2	5	1	eks-Bengkok Kepala Urusan Keuangan				

1	1	1	2	5	2	eks-Bengkok Kepala Urusan Umum				
1	1	1	2	6		eks-Bengkok Staf/Pembantu				
1	1	1	2	6	1	eks-Bengkok Staf/Pembantu Kasi				
1	1	1	2	6	2	eks-Bengkok Staf/Pembantu Kaur				
1	1	1	2	6	3	dst...				
1	1	1	3			Iuran Dharma Tirta/Perkumpulan Petani Pemakai Air				
1	1	1	4			Hasil Tanah Kas Desa yang berasal dari Pembelian/Pengadaan yang dibiayai APBDesa				
1	1	1	5			Lain-lain Hasil Usaha Desa yang Sah				
1	1	2				Hasil Aset Desa				
1	1	2	1			Hasil Tanah Kas Desa Asli Kekayaan Desa				
1	1	2	1	1		Bondo Desa				
1	1	2	1	2		Dst...				
1	1	2	2			Hasil Pasar Desa				
1	1	2	2	1		Hasil Pasar Desa yang dikelola sendiri				
1	1	2	2	2		Dst.....				
1	1	2	3			Hasil Pasar Hewan Desa				
1	1	2	3	1		Hasil Pasar Hewan Desa yang dikelola sendiri				
1	1	2	4			Hasil Bangunan Desa				
1	1	2	4	1		Hasil Sewa Aula Desa/Gedung Pertemuan Desa				
1	1	2	4	2		Dst.....				
1	1	2	5			Objek Rekreasi Desa				
1	1	2	5	1		Retribusi Obyek Rekreasi				
1	1	2	5	2		Retribusi Parkir Obyek Rekreasi				
1	1	2	5	3		Dst.....				
1	1	2	6			Hasil Pemandian Umum Desa				
1	1	2	6	1		Retribusi Pemandian Umum Desa				
1	1	2	6	2		Dst.....				
1	1	2	7			Lain-lain Hasil Kekayaan Milik Desa				
1	1	2	7	1		Hasil Kios Desa				
1	1	2	7	2		Dst.....				
1	1	2	8			Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak Dipisahkan				
1	1	2	8	1		Pelepasan Hak Atas Tanah				

[illegible]

1	1	4	6			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan					
1	1	4	6	1		Kegiatan Pembuatan Jalan					
1	1	4	6	2		Kegiatan Pengaspalan Jalan					
1	1	4	6	3		Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi					
1	1	4	6	4		Kegiatan Rehabilitas Irigasi					
1	1	4	6	5		Kegiatan Pembuatan Jembatan					
1	1	4	6	6		Kegiatan Rehabilitas Jembatan					
1	1	4	6	7		Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa					
1	1	4	6	8		Kegiatan Rehabilitas Bangunan Desa					
1	1	4	6	9		Dst.....					
1	1	4	7			Pendapatan dari Pengembalian					
1	1	4	7	1		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan					
1	1	4	7	2		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
1	1	4	7	3		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas					
1	1	4	7	4		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan dari Uang Muka					
1	1	4	7	5		Dst.....					
1	1	4	9			Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan					
1	1	4	9	1		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan					
1	1	4	9	2		Dst.....					
1	2					<u>Pendapatan Transfer</u>					
1	2	1				<u>Dana Desa</u>					
1	2	2				<u>Bagian dari Hasil Pajak dan/atau Retribusi Daerah Kabupaten untuk Desa</u>					
1	2	3				<u>Alokasi Dana Desa (ADD)</u>					
1	2	4				<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi</u>					
1	2	4	1			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Umum					
1	2	4	2			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Khusus					
1	2	5				<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten</u>					
1	2	5	1			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Umum					

						Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Khusus					
1	3					Pendapatan Lain-Lain					
1	3	1				Hibah					
1	3	1	1			Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Dalam Desa					
1	3	1	1	1		Hibah dari Lembaga/Organisasi Negara Non Pemerintah					
1	3	1	1	2		Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta					
1	3	1	2			Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Luar Desa					
1	3	1	2	1		Hibah dari Lembaga/Organisasi Negara Non Pemerintah					
1	3	1	2	2		Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta					
1	3	2				Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam					
1	3	2	1			Dana Darurat Dari Pemerintah					
1	3	2	2			Dana Darurat Dari Pemerintah Provinsi					
1	3	2	3			Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten					
1	3	2	4			Dana Darurat Dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah					
1	3	3				Sumbangan Lainnya Yang Tidak Mengikat					
1	3	3	1			Hadiah					
1	3	3	1	1		Hadiah Lomba Desa					
1	3	3	1	2		Hadiah Lomba PKK					
1	3	3	1	3		Hadiah Lomba PBB					
1	3	3	1	4		Hadiah Lomba.....					
1	3	3	2			Donasi					
1	3	3	3			Lain-lain Sumbangan					
1						JUMLAH PENDAPATAN					
2						BELANJA DESA					
2	1					Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	1	1				Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
2	1	1	1			Belanja Pegawai					
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa					
2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa					
2	1	1	1	1	2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa					

2	1	1	1	1	4	Penghasilan Tetap Kepala Dusun I					
2	1	1	1	1	5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun II					
2	1	1	1	1	6	Penghasilan Tetap Kepala Dusun III					
2	1	1	1	1	7	dst...					
2	1	1	1	1	9	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pembangunan					
2	1	1	1	1	10	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pemerintahan					
2	1	1	1	1	11	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	1	1	1	1	13	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan					
2	1	1	1	1	14	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum					
2	1	1	1	1	16	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Pembangunan					
2	1	1	1	1	17	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan					
2	1	1	1	1	18	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	1	1	1	1	19	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Umum					
2	1	1	1	1	20	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Keuangan					
2	1	1	1	1	21	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun I					
2	1	1	1	1	22	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun II					
2	1	1	1	1	23	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun III					
2	1	1	1	1	24	dst...					
2	1	1	1	2		Tunjangan-Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa					
2	1	1	1	2	1	Tunjangan Jabatan Kepala Desa					
2	1	1	1	2	2	Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa					
2	1	1	1	2	4	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun I					
2	1	1	1	2	5	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun II					
2	1	1	1	2	6	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun III					
2	1	1	1	2	7	dst..					
2	1	1	1	2	9	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Pembangunan					
2	1	1	1	2	10	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan					
2	1	1	1	2	11	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					

2	1	1	1	2	13	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	14	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	17	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	17	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	1	21	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun I				
2	1	1	1	1	22	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun II				
2	1	1	1	1	23	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	18	dst...				
2	1	1	1	2	19	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Desa				
2	1	1	1	2	20	Tunjangan Istri atau Suami Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	22	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	23	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	24	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	25	dst...				
2	1	1	1	2	27	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	28	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	29	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	31	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	32	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	35	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	36	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	37	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	39	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kaur Umum				

2	1	1	1	2	40	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	42	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus I				
2	1	1	1	2	43	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	44	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	45	dst...				
2	1	1	1	2	46	Tunjangan Anak Kepala Desa				
2	1	1	1	2	47	Tunjangan Anak Pertama Kepala Desa				
2	1	1	1	2	48	Tunjangan Anak Kedua Kepala Desa				
2	1	1	1	2	49	Tunjangan Anak Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	50	Tunjangan Anak Pertama Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	51	Tunjangan Anak Kedua Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	52	Tunjangan Anak Kepala Dusun				
2	1	1	1	2	53	Tunjangan Anak Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	54	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	55	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	56	Tunjangan Anak Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	57	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	58	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	59	Tunjangan Anak Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	60	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	61	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	62	dst...				
2	1	1	1	2	63	Tunjangan Anak Kepala Seksi				
2	1	1	1	2	64	Tunjangan Anak Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	65	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	66	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	67	Tunjangan Anak Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	68	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	69	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	70	Tunjangan Anak Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	71	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	72	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				

2	1	1	1	2	73	Tunjangan Anak Kepala Urusan					
2	1	1	1	2	74	Tunjangan Anak Kepala Urusan Keuangan					
2	1	1	1	2	75	Tunjangan Anak Pertama Kepala Urusan Keuangan					
2	1	1	1	2	76	Tunjangan Anak Kedua Kepala Urusan Keuangan					
2	1	1	1	2	77	Tunjangan Anak Kepala Urusan Umum					
2	1	1	1	2	78	Tunjangan Anak Pertama Kepala Urusan Umum					
2	1	1	1	2	79	Tunjangan Anak Kedua Kepala Urusan Umum					
2	1	1	1	2	80	Tunjangan Anak Staf/Pembantu					
2	1	1	1	2	81	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Pembangunan					
2	1	1	1	2	82	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Pembangunan					
2	1	1	1	2	83	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Pembangunan					
2	1	1	1	2	84	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan					
2	1	1	1	2	85	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan					
2	1	1	1	2	86	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan					
2	1	1	1	2	87	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	1	1	1	2	88	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	1	1	1	2	89	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	1	1	1	2	90	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kaur Umum					
2	1	1	1	2	91	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kaur Umum					
2	1	1	1	2	92	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kaur Umum					
2	1	1	1	2	93	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kaur Keuangan					
2	1	1	1	2	94	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kaur Keuangan					
2	1	1	1	2	95	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kaur Keuangan					
2	1	1	1	2	96	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus I					
2	1	1	1	2	97	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus I					

2	1	1	1	2	98	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus I				
2	1	1	1	2	99	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	100	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	101	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	102	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	103	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	104	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	105	dst...				
2	1	1	1	2	106	Tunjangan Kesehatan Kepala Desa				
2	1	1	1	2	107	Tunjangan Kesehatan Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	108	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun				
2	1	1	1	2	109	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	110	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	111	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	112	dst...				
2	1	1	1	2	113	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi				
2	1	1	1	2	114	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	115	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	116	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	117	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan				
2	1	1	1	2	118	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	119	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan Umum				
2										
2	1	1	1	3		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa				
2	1	1	1	3	1	Tambahan Penghasilan Kepala Desa				
2	1	1	1	3	2	Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa				
2	1	1	1	3	3	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun				
2	1	1	1	3	4	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun I				
2	1	1	1	3	5	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun II				
2	1	1	1	3	6	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun III				
2	1	1	1	3	7	dst...				
2	1	1	1	3	8	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi				
2	1	1	1	3	9	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pembangunan				

2	1	1	1	3	10	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	3	11	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	3	12	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan				
2	1	1	1	3	13	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	3	14	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	3	15	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu				
2	1	1	1	3	16	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	3	17	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	3	18	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	3	19	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	3	20	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	3	21	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun I				
2	1	1	1	3	22	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun II				
2	1	1	1	3	23	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun III				
2	1	1	1	3	24	dst...				
2	1	1	1	4		Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
2	1	1	1	4	1	Tunjangan Ketua BPD				
2	1	1	1	4	2	Tunjangan Wakil Ketua BPD				
2	1	1	1	4	3	Tunjangan Bidang I BPD				
2	1	1	1	4	4	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	5	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	6	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	7	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	8	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	9	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	10	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	11	Tunjangan Anggota BPD				
						-				
2	1	2				Operasional Pemerintahan Desa				
2	1	2	1			Operasional Perkantoran				
2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	2	1		- Alat Tulis Kantor				

2	1	2	2	2		- Benda POS				
2	1	2	2	3		- Pakaian Dinas dfan Atribut				
2	1	2	2	4		- Pakaian Dinas				
2	1	2	2	5		- Alat dan Bahan Kebersihan				
2	1	2	2	6		- Perjalanan Dinas				
2	1	2	2	7		- Pemeliharaan				
2	1	2	2	8		- Air, Listrik,dasn Telepon				
2	1	2	2	9		- Honor				
2	1	2	2	10		- dst.....				
2	1	2	3			Belanja Modal				
2	1	2	3	1		- Komputer				
2	1	2	3	2		- Meja dan Kursi				
2	1	2	3	3		- Mesin TIK				
2	1	2	3	4		- Pengadaan Tanah Kas Desa				
2	1	2	3	5		- dst.....				
2	1	2	4			Operasional BPD				
2	1	2	4	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	4	1	1	- ATK				
2	1	2	4	1	2	- Penggandaan				
2	1	2	4	1	3	- Konsumsi Rapat				
2	1	2	4	1	4	- dst				
2	1	2	5			Operasional RT/ RW				
2	1	2	5	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	5	1	1	- ATK				
2	1	2	5	1	2	- Penggandaan				
2	1	2	5	1	3	- Konsumsi Rapat				
2	1	2	5	1	4	- dst				
2	2					<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>				
2	2	1				Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	1			Belanja Barang dan jasa				
2	2	1	1	1		- Upah Kerja				
2	2	1	1	2		- Honor				
2	2	1	1	3		- dst.....				
2	2	1	2			Belanja Modal				
2	2	1	2	1		- Semen				
2	2	1	2	2		- Material				
2	2	1	2	3		- dst.....				
2	2					Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	1			Belanja Barang dan Jasa :				
2	2	2	1	1		- Upah Kerja				
2	2	2	1	2		- Honor				
2	2	2	1	3		- dst.....				
2	2	2	2			Belanja Modal:				
2	2	2	2	1		- Aspal				
2	2	2	2	2		- Pasir				

2	2	2	2	3		- dst				
2	2	3				Kegiatan.....dst				
2	3					<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>				
2	3	1				Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	1			Belanja Barang dan Jasa:				
2	3	1	1	1		- Honor Pelatih				
2	3	1	1	2		- Konsumsi				
2	3	1	1	3		- Bahan Pelatihan				
2	3	1	1	4		- dst.....				
2	3	2				Kegiatan.....dst				
2	4					<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>				
2	4	1				Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	1			Belanja Barang dan Jasa:				
2	4	1	1	1		- Honor pelatih				
2	4	1	1	2		- Konsumsi				
2	4	1	1	3		- Bahan pelatihan				
2	4	1	1	4		- dst.....				
2	4	2				Kegiatan.....dst				
2	5					<u>Bidang Tak Terduga</u>				
2	5	1				Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	1			Belanja Barang dan Jasa:				
2	5	1	1	1		- Honor tim				
2	5	1	1	2		- Konsumsi				
2	5	1	1	3		- Obat-obatan				
2	5	1	1	4		- dst.....				
2	5	2				Kegiatan.....dst				
2										
2						<u>JUMLAH BELANJA</u>				
2										
2						<u>SURPLUS / DEFISIT</u>				
3										
3	1					<u>PEMBIAYAAN</u>				
3	1					<u>Penerimaan Pembiayaan</u>				
3	1	1				SiLPA				
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan				
3	1	2	1			Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa				
3	1	2	2			Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa				

3	1	2	2	1		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa					
3	1	2	2	2		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa					
3	1	2	2	3		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Seksi...					
3	1	2	2	4		dst....					
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan					
3	1					JUMLAH (RP)					
3											
3	2					<u>Pengeluaran Pembiayaan</u>					
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan					
3	2	1	1			Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa					
3	2	1	2			Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa					
3	2	1	2	1		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa					
3	2	1	2	2		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa					
3	2	1	2	3		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Seksi...					
3	2	1	2	4		dst....					
3	2	2				Penyertaan Modal Desa					
3	2					JUMLAH (RP)					

KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANYUMAS

TTD

(.....)

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA



KEPALA DESA.....KECAMATAN....
KABUPATEN BANYUMAS

RANCANGAN PERATURAN DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran....;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan DesaKecamatan..... Kabupaten Banyumas tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang APBDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAKECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
Rp.....
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
 - e. Bidang Tak Terduga Rp.....
 - Jumlah Belanja Rp.....
 - Surplus/Defisit
Rp.....
=====
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.
 - Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....
=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN
DESA...KECAMATAN...KABUPATEN BANYUMAS
NOMORTAHUN.....
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN APBDesa TAHUN
ANGGARAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
PEMERINTAH DESAKECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	KET
I						II	III	IV	V	VI
1						<u>PENDAPATAN DESA</u>				
1	1					<u>Pendapatan Asli Desa</u>				
1	1	1				<u>Hasil Usaha</u>				
1	1	1	1			Hasil Pengelolaan Aset Desa yang Dipisahkan				
1	1	1	1	1	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Desa /BUM Desa				
1	1	1	1	1	2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD				
1	1	1	1	1	3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah /BUMN				
1	1	1	1	1	4	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat				
1	1	1	2			Hasil eks-Bengkok Desa				
1	1	1	2	1		eks-Bengkok Kepala Desa				
1	1	1	2	2		eks-Bengkok Sekretaris Desa				
1	1	1	2	3		eks-Bengkok Kepala Dusun				
1	1	1	2	3	1	eks-Bengkok Kepala Dusun I				
1	1	1	2	3	2	eks-Bengkok Kepala Dusun II				
1	1	1	2	3	3	eks-Bengkok Kepala Dusun III				
1	1	1	2	3	4	dst...				
1	1	1	2	4		eks-Bengkok Kepala Seksi				
1	1	1	2	4	1	eks-Bengkok Kepala Seksi Pembangunan				
1	1	1	2	4	2	eks-Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan				
1	1	1	2	4	3	eks-Bengkok Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				

1	1	1	2	5		eks-Bengkok Kepala Urusan					
1	1	1	2	5	1	eks-Bengkok Kepala Urusan Keuangan					
1	1	1	2	5	2	eks-Bengkok Kepala Urusan Umum					
1	1	1	2	6		eks-Bengkok Staf/Pembantu					
1	1	1	2	6	1	eks-Bengkok Staf/Pembantu Kasi					
1	1	1	2	6	2	eks-Bengkok Staf/Pembantu Kaur					
1	1	1	2	6	3	dst...					
1	1	1	3			Iuran Dharma Tirta/Perkumpulan Petani Pemakai Air					
1	1	1	4			Hasil Tanah Kas Desa yang berasal dari Pembelian/Pengadaan yang dibiayai APBDesa					
1	1	1	5			Lain-lain Hasil Usaha Desa yang Sah					
1	1	2				<u>Hasil Aset Desa</u>					
1	1	2	1			Hasil Tanah Kas Desa Asli Kekayaan Desa					
1	1	2	1	1		Bondo Desa					
1	1	2	1	2		Dst...					
1	1	2	2			Hasil Pasar Desa					
1	1	2	2	1		Hasil Pasar Desa yang dikelola sendiri					
1	1	2	2	2		Dst.....					
1	1	2	3			Hasil Pasar Hewan Desa					
1	1	2	3	1		Hasil Pasar Hewan Desa yang dikelola sendiri					
1	1	2	4			Hasil Bangunan Desa					
1	1	2	4	1		Hasil Sewa Aula Desa/Gedung Pertemuan Desa					
1	1	2	4	2		Dst.....					
1	1	2	5			Objek Rekreasi Desa					
1	1	2	5	1		Retribusi Obyek Rekreasi					
1	1	2	5	2		Retribusi Parkir Obyek Rekreasi					
1	1	2	5	3		Dst.....					
1	1	2	6			Hasil Pemandian Umum Desa					
1	1	2	6	1		Retribusi Pemandian Umum Desa					
1	1	2	6	2		Dst.....					
1	1	2	7			Lain-lain Hasil Kekayaan Milik Desa					
1	1	2	7	1		Hasil Kios Desa					
1	1	2	7	2		Dst.....					
1	1	2	8			Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak Dipisahkan					

[illegible]

1	1	4	6			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan					
1	1	4	6	1		Kegiatan Pembuatan Jalan					
1	1	4	6	2		Kegiatan Pengaspalan Jalan					
1	1	4	6	3		Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi					
1	1	4	6	4		Kegiatan Rehabilitas Irigasi					
1	1	4	6	5		Kegiatan Pembuatan Jembatan					
1	1	4	6	6		Kegiatan Rehabilitas Jembatan					
1	1	4	6	7		Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa					
1	1	4	6	8		Kegiatan Rehabilitas Bangunan Desa					
1	1	4	6	9		Dst.....					
1	1	4	7			Pendapatan dari Pengembalian					
1	1	4	7	1		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan					
1	1	4	7	2		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
1	1	4	7	3		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas					
1	1	4	7	4		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan dari Uang Muka					
1	1	4	7	5		Dst.....					
1	1	4	9			Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan					
1	1	4	9	1		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan					
1	1	4	9	2		Dst.....					
1	2					<u>Pendapatan Transfer</u>					
1	2	1				<u>Dana Desa</u>					
1	2	2				<u>Bagian dari Hasil Pajak dan/atau Retribusi Daerah Kabupaten untuk Desa</u>					
1	2	3				<u>Alokasi Dana Desa (ADD)</u>					
1	2	4				<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi</u>					
1	2	4	1			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Umum					
1	2	4	2			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Khusus					
1	2	5				<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten</u>					
1	2	5	1			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Umum					

						Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Khusus				
1	3					Pendapatan Lain-Lain				
1	3	1				Hibah				
1	3	1	1			Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Dalam Desa				
1	3	1	1	1		Hibah dari Lembaga/Organisasi Negara Non Pemerintah				
1	3	1	1	2		Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta				
1	3	1	2			Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Luar Desa				
1	3	1	2	1		Hibah dari Lembaga/Organisasi Negara Non Pemerintah				
1	3	1	2	2		Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta				
1	3	2				Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam				
1	3	2	1			Dana Darurat Dari Pemerintah				
1	3	2	2			Dana Darurat Dari Pemerintah Provinsi				
1	3	2	3			Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten				
1	3	2	4			Dana Darurat Dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah				
1	3	3				Sumbangan Lainnya Yang Tidak Mengikat				
1	3	3	1			Hadiah				
1	3	3	1	1		Hadiah Lomba Desa				
1	3	3	1	2		Hadiah Lomba PKK				
1	3	3	1	3		Hadiah Lomba PBB				
1	3	3	1	4		Hadiah Lomba.....				
1	3	3	2			Donasi				
1	3	3	3			Lain-lain Sumbangan				
1						JUMLAH PENDAPATAN				
2						BELANJA DESA				
2	1					Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1				Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1			Belanja Pegawai				
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa				
2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa				
2	1	1	1	1	2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa				

2	1	1	1	1	4	Penghasilan Tetap Kepala Dusun I					
2	1	1	1	1	5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun II					
2	1	1	1	1	6	Penghasilan Tetap Kepala Dusun III					
2	1	1	1	1	7	dst...					
2	1	1	1	1	9	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pembangunan					
2	1	1	1	1	10	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pemerintahan					
2	1	1	1	1	11	Penghasilan Tetap Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	1	1	1	1	13	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan					
2	1	1	1	1	14	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum					
2	1	1	1	1	16	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Pembangunan					
2	1	1	1	1	17	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan					
2	1	1	1	1	18	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	1	1	1	1	19	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Umum					
2	1	1	1	1	20	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kaur Keuangan					
2	1	1	1	1	21	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun I					
2	1	1	1	1	22	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun II					
2	1	1	1	1	23	Penghasilan Tetap Staf/Pembantu Kepala Dusun III					
2	1	1	1	1	24	dst...					
2	1	1	1	2		Tunjangan-Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa					
2	1	1	1	2	1	Tunjangan Jabatan Kepala Desa					
2	1	1	1	2	2	Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa					
2	1	1	1	2	4	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun I					
2	1	1	1	2	5	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun II					
2	1	1	1	2	6	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun III					
2	1	1	1	2	7	dst...					
2	1	1	1	2	9	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Pembangunan					
2	1	1	1	2	10	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan					
2	1	1	1	2	11	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					

2	1	1	1	2	13	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	14	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	16	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	17	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	17	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	1	21	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun I				
2	1	1	1	1	22	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun II				
2	1	1	1	1	23	Tunjangan Jabatan Staf/Pembantu Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	18	dst...				
2	1	1	1	2	19	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Desa				
2	1	1	1	2	20	Tunjangan Istri atau Suami Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	22	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	23	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	24	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	25	dst...				
2	1	1	1	2	27	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	28	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	29	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	31	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	32	Tunjangan Istri atau Suami Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	2	35	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	2	36	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	37	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	39	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kaur Umum				

2	1	1	1	2	40	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	2	42	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus I				
2	1	1	1	2	43	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	44	Tunjangan Istri atau Suami Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	45	dst...				
2	1	1	1	2	46	Tunjangan Anak Kepala Desa				
2	1	1	1	2	47	Tunjangan Anak Pertama Kepala Desa				
2	1	1	1	2	48	Tunjangan Anak Kedua Kepala Desa				
2	1	1	1	2	49	Tunjangan Anak Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	50	Tunjangan Anak Pertama Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	51	Tunjangan Anak Kedua Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	52	Tunjangan Anak Kepala Dusun				
2	1	1	1	2	53	Tunjangan Anak Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	54	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	55	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	56	Tunjangan Anak Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	57	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	58	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	59	Tunjangan Anak Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	60	Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	61	Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	62	dst...				
2	1	1	1	2	63	Tunjangan Anak Kepala Seksi				
2	1	1	1	2	64	Tunjangan Anak Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	65	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	66	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	67	Tunjangan Anak Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	68	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	69	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	70	Tunjangan Anak Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	71	Tunjangan Anak Pertama Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	72	Tunjangan Anak Kedua Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				

2	1	1	1	2	73	Tunjangan Anak Kepala Urusan					
2	1	1	1	2	74	Tunjangan Anak Kepala Urusan Keuangan					
2	1	1	1	2	75	Tunjangan Anak Pertama Kepala Urusan Keuangan					
2	1	1	1	2	76	Tunjangan Anak Kedua Kepala Urusan Keuangan					
2	1	1	1	2	77	Tunjangan Anak Kepala Urusan Umum					
2	1	1	1	2	78	Tunjangan Anak Pertama Kepala Urusan Umum					
2	1	1	1	2	79	Tunjangan Anak Kedua Kepala Urusan Umum					
2	1	1	1	2	80	Tunjangan Anak Staf/Pembantu					
2	1	1	1	2	81	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Pembangunan					
2	1	1	1	2	82	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Pembangunan					
2	1	1	1	2	83	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Pembangunan					
2	1	1	1	2	84	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan					
2	1	1	1	2	85	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan					
2	1	1	1	2	86	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan					
2	1	1	1	2	87	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	1	1	1	2	88	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	1	1	1	2	89	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
2	1	1	1	2	90	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kaur Umum					
2	1	1	1	2	91	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kaur Umum					
2	1	1	1	2	92	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kaur Umum					
2	1	1	1	2	93	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kaur Keuangan					
2	1	1	1	2	94	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kaur Keuangan					
2	1	1	1	2	95	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kaur Keuangan					
2	1	1	1	2	96	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus I					
2	1	1	1	2	97	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus I					

2	1	1	1	2	98	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus I				
2	1	1	1	2	99	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	100	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	101	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus II				
2	1	1	1	2	102	Tunjangan Anak Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	103	Tunjangan Anak Pertama Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	104	Tunjangan Anak Kedua Staf/Pembantu Kadus III				
2	1	1	1	2	105	dst...				
2	1	1	1	2	106	Tunjangan Kesehatan Kepala Desa				
2	1	1	1	2	107	Tunjangan Kesehatan Sekretaris Desa				
2	1	1	1	2	108	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun				
2	1	1	1	2	109	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun I				
2	1	1	1	2	110	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun II				
2	1	1	1	2	111	Tunjangan Kesehatan Kepala Dusun III				
2	1	1	1	2	112	dst...				
2	1	1	1	2	113	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi				
2	1	1	1	2	114	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Pembangunan				
2	1	1	1	2	115	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	2	116	Tunjangan Kesehatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	2	117	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan				
2	1	1	1	2	118	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	2	119	Tunjangan Kesehatan Kepala Urusan Umum				
2										
2	1	1	1	3		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa				
2	1	1	1	3	1	Tambahan Penghasilan Kepala Desa				
2	1	1	1	3	2	Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa				
2	1	1	1	3	3	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun				
2	1	1	1	3	4	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun I				
2	1	1	1	3	5	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun II				
2	1	1	1	3	6	Tambahan Penghasilan Kepala Dusun III				
2	1	1	1	3	7	dst...				
2	1	1	1	3	8	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi				
2	1	1	1	3	9	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pembangunan				

2	1	1	1	3	10	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pemerintahan				
2	1	1	1	3	11	Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	3	12	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan				
2	1	1	1	3	13	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Keuangan				
2	1	1	1	3	14	Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Umum				
2	1	1	1	3	15	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu				
2	1	1	1	3	16	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Pembangunan				
2	1	1	1	3	17	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Pemerintahan				
2	1	1	1	3	18	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
2	1	1	1	3	19	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kaur Umum				
2	1	1	1	3	20	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kaur Keuangan				
2	1	1	1	3	21	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun I				
2	1	1	1	3	22	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun II				
2	1	1	1	3	23	Tambahan Penghasilan Staf/Pembantu Kepala Dusun III				
2	1	1	1	3	24	dst...				
2	1	1	1	4		Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
2	1	1	1	4	1	Tunjangan Ketua BPD				
2	1	1	1	4	2	Tunjangan Wakil Ketua BPD				
2	1	1	1	4	3	Tunjangan Bidang I BPD				
2	1	1	1	4	4	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	5	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	6	Tunjangan Bidang ... BPD				
2	1	1	1	4	7	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	8	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	9	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	10	Tunjangan Anggota BPD				
2	1	1	1	4	11	Tunjangan Anggota BPD				
						-				
2	1	2				Operasional Pemerintahan Desa				
2	1	2	1			Operasional Perkantoran				
2	1	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	2	1		- Alat Tulis Kantor				

2	1	2	2	2		- Benda POS				
2	1	2	2	3		- Pakaian Dinas dfan Atribut				
2	1	2	2	4		- Pakaian Dinas				
2	1	2	2	5		- Alat dan Bahan Kebersihan				
2	1	2	2	6		- Perjalanan Dinas				
2	1	2	2	7		- Pemeliharaan				
2	1	2	2	8		- Air, Listrik,dasn Telepon				
2	1	2	2	9		- Honor				
2	1	2	2	10		- dst.....				
2	1	2	3			Belanja Modal				
2	1	2	3	1		- Komputer				
2	1	2	3	2		- Meja dan Kursi				
2	1	2	3	3		- Mesin TIK				
2	1	2	3	4		- Pengadaan Tanah Kas Desa				
2	1	2	3	5		- dst.....				
2	1	2	4			Operasional BPD				
2	1	2	4	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	4	1	1	- ATK				
2	1	2	4	1	2	- Penggandaan				
2	1	2	4	1	3	- Konsumsi Rapat				
2	1	2	4	1	4	- dst				
2	1	2	5			Operasional RT/ RW				
2	1	2	5	1		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2	5	1	1	- ATK				
2	1	2	5	1	2	- Penggandaan				
2	1	2	5	1	3	- Konsumsi Rapat				
2	1	2	5	1	4	- dst				
2	2					<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>				
2	2	1				Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	1			Belanja Barang dan jasa				
2	2	1	1	1		- Upah Kerja				
2	2	1	1	2		- Honor				
2	2	1	1	3		- dst.....				
2	2	1	2			Belanja Modal				
2	2	1	2	1		- Semen				
2	2	1	2	2		- Material				
2	2	1	2	3		- dst.....				
2	2					Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	1			Belanja Barang dan Jasa :				
2	2	2	1	1		- Upah Kerja				
2	2	2	1	2		- Honor				
2	2	2	1	3		- dst.....				
2	2	2	2			Belanja Modal:				
2	2	2	2	1		- Aspal				
2	2	2	2	2		- Pasir				

2	2	2	2	3		- dst					
2	2	3				Kegiatan.....dst					
2	3					<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>					
2	3	1				Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban					
2	3	1	1			Belanja Barang dan Jasa:					
2	3	1	1	1		- Honor Pelatih					
2	3	1	1	2		- Konsumsi					
2	3	1	1	3		- Bahan Pelatihan					
2	3	1	1	4		- dst.....					
2	3	2				Kegiatan.....dst					
2	4					<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>					
2	4	1				Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat					
2	4	1	1			Belanja Barang dan Jasa:					
2	4	1	1	1		- Honor pelatih					
2	4	1	1	2		- Konsumsi					
2	4	1	1	3		- Bahan pelatihan					
2	4	1	1	4		- dst.....					
2	4	2				Kegiatan.....dst					
2	5					<u>Bidang Tak Terduga</u>					
2	5	1				Kegiatan Kejadian Luar Biasa					
2	5	1	1			Belanja Barang dan Jasa:					
2	5	1	1	1		- Honor tim					
2	5	1	1	2		- Konsumsi					
2	5	1	1	3		- Obat-obatan					
2	5	1	1	4		- dst.....					
2	5	2				Kegiatan.....dst					
2						JUMLAH BELANJA					
						SURPLUS / DEFISIT					
3						PEMBIAYAAN					
3	1					Penerimaan Pembiayaan					
3	1	1				SILPA					
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan					
3	1	2	1			Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa					
3	1	2	2			Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa					

3	1	2	2	1		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa					
3	1	2	2	2		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa					
3	1	2	2	3		Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Seksi...					
3	1	2	2	4		dst....					
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan					
3						JUMLAH (RP)					
3											
3	2					<u>Pengeluaran Pembiayaan</u>					
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan					
3	2	1	1			Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa					
3	2	1	2			Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa					
3	2	1	2	1		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa					
3	2	1	2	2		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa					
3	2	1	2	3		Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Seksi...					
3	2	1	2	4		dst....					
3	2	2				Penyertaan Modal Desa					
3	2					JUMLAH (RP)					

TANGGAL

TTD
(KEPALA DESA)

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN DESA
....KECAMATAN....KABUPATEN BANYUMAS
NOMORTAHUN.....
TENTANG
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - II)		

TANGGAL

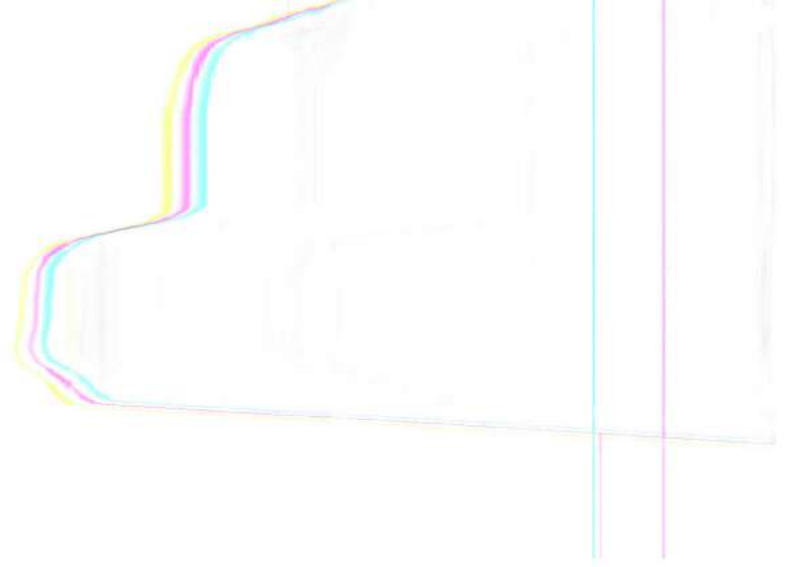
TTD
(KEPALA DESA)

Penjelasan tabel:

1. *Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.*
2. *Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.*
3. *Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.*
4. *Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.*
5. *Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.*
6. *Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.*
7. *Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.*
8. *Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.*

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.



LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN
DESA...KECAMATAN....KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH
YANG MASUK KE DESA

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4) Total (1 s/d 4)							Rp. Rp.

tanggal,
Kepala Desa
(.....)